



**PENGARUH IPM, UMK DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP
DISPARITAS REGIONAL ANTAR KABUPATEN DI WILAYAH
BAKORWIL V PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2010 – 2016**

SKRIPSI

Oleh

**Indah Azizatur Rosidah
NIM 140810101169**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**PENGARUH IPM, UMK DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP
DISPARITAS REGIONAL ANTAR KABUPATEN DI WILAYAH
BAKORWIL V PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2010 – 2016**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1) dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

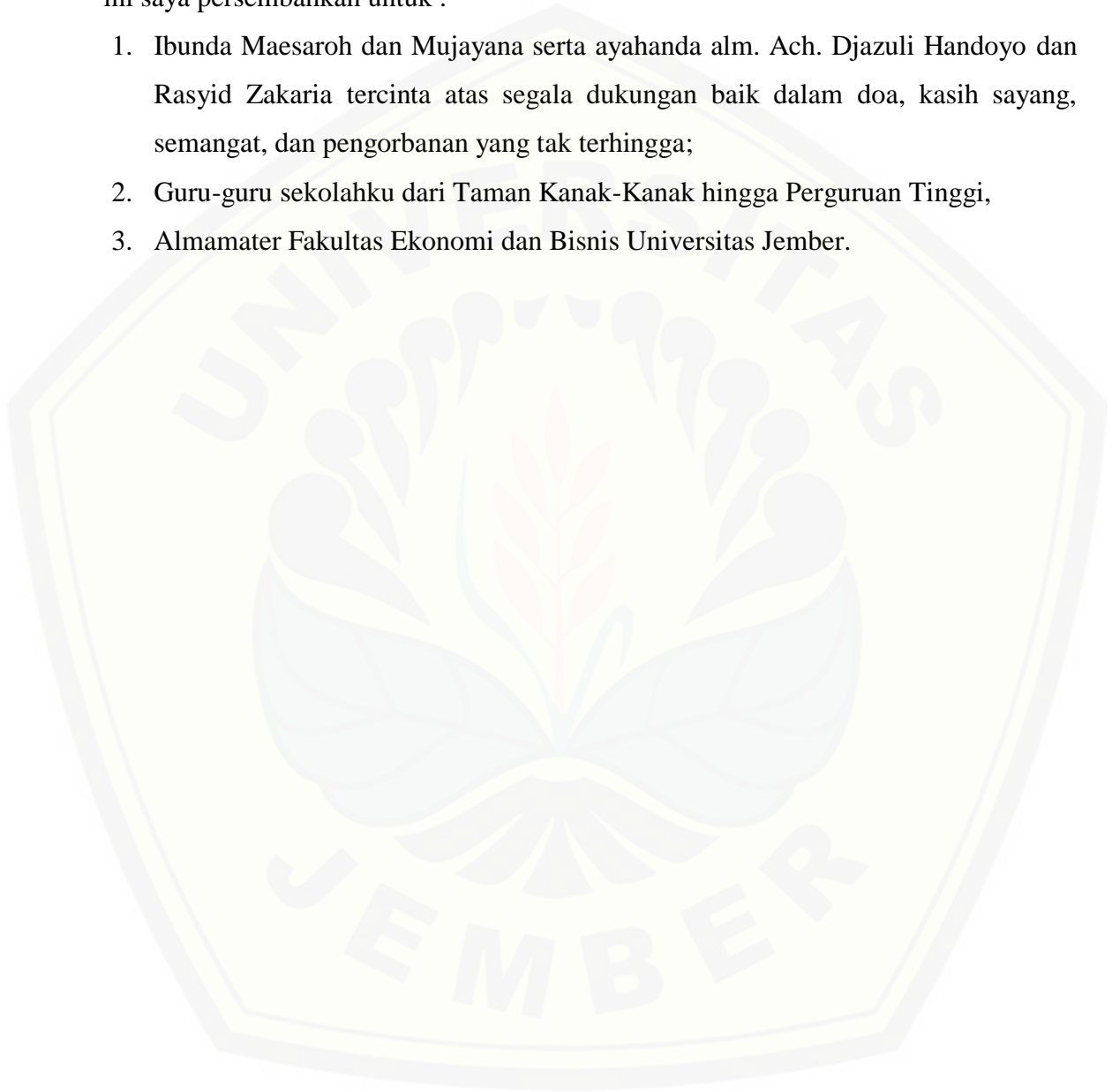
**Indah Azizatur Rosidah
NIM 140810101169**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ibunda Maesaroh dan Mujayana serta ayahanda alm. Ach. Djazuli Handoyo dan Rasyid Zakaria tercinta atas segala dukungan baik dalam doa, kasih sayang, semangat, dan pengorbanan yang tak terhingga;
2. Guru-guru sekolahku dari Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi,
3. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.



MOTTO

" Jangan membenci mereka yang membencimu, tetapi bertemanlah, karena dengan begitu mereka akan lebih menghargaimu."

(Maesaroh)

“Work hard for what you want because it won’t come to you without a fight. You have to be strong and courageous and know that you can do anything you put your mind to. If somebody puts you down or criticizes you, just keep on believing in yourself and turn it into something positive.”

(Leah LaBelle)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Azizatur Rosidah

NIM : 140810101169

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: “Pengaruh IPM, UMK dan Tingkat Pendidikan terhadap Disparitas Regional antar Kabupaten/Kota di wilayah BAKORWIL V Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2016” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 21 Juni 2018

Yang menyatakan,

Indah Azizatur Rosidah

NIM 140810101169

SKRIPSI

**PENGARUH IPM, UMK DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP
DISPARITAS REGIONAL ANTAR KABUPATEN DI WILAYAH
BAKORWIL V PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2010 – 2016**

oleh
Indah Azizatur Rosidah
NIM 140810101169

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Agus Luthfi, M.Si.

Dosen Pembimbing Anggota : Fajar Wahyu Prianto, S.E., M.E.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pengaruh IPM, UMK dan Tingkat Pendidikan terhadap Disparitas Regional antar Kabupaten/Kota di wilayah BAKORWIL V Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2016

Nama Mahasiswa : Indah Azizatur Rosidah

NIM : 1140810101169

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Konsentrasi : Ekonomi Regional

Tanggal Persetujuan :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Agus Luthfi, M.Si.
NIP. 19650522199021001

Fajar Wahyu Prianto, S.E., M.E
NIP. 198103302005011003

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dr. Sebastiana Viphindrartin, M.Kes
NIP. 196411081989022001

PENGESAHAN

Judul Skripsi

**PENGARUH IPM, UMK DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP
DISPARITAS REGIONAL ANTAR KABUPATEN DI WILAYAH
BAKORWIL V PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2010 – 2016**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Indah Azizatur Rosidah

NIM : 140810101169

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan
guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua (.....)
2. Sekertaris (.....)
3. Anggota (.....)

Mengetahui/Menyetujui,
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan,

Foto 4 x 6

Warna

Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak.,CA
NIP. 19710727199512101

Pengaruh IPM, UMK dan Tingkat Pendidikan terhadap Disparitas Regional antar Kabupaten/Kota di wilayah BAKORWIL V Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2016

Indah Azizatur Rosidah

Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel-variabel terhadap ketimpangan wilayah atau disparitas regional antar kabupaten/kota di wilayah Bakorwil V Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2016. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ialah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Tingkat Pendidikan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan studi kasus yang dilakukan di Bakorwil V pada periode 2010-2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan di Bakorwil V. Upah Minimum Kabupaten (UMK) berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan di Bakorwil V, dan Tingkat Pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan di Bakorwil V.

Kata Kunci: Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum, Tingkat Pendidikan, Ketimpangan

The Influence of HDI, MSEs and Education Levels on Regional Disparities between Regencies / Cities in BAKORWIL V East Java Province 2010-2016

Indah Azizatur Rosidah

Department of Economics, Faculty of Ekonomy and Business, University of Jember

ABSTRACT

This study aims to analyzes the influence of variables on regional disparity between districts/cities in Bakorwil V region of East Java Province in 2010-2016 by using panel data. The variables in this study are Human Development Index (HDI), Minimum Wage (MSEs) and Education Level. And the results of this study indicate that Human Development Index (HDI) has a negative significant effect on disparity in Bakorwil V. Minimum Wage (MSEs) has a positive significant effect on disparity in Bakorwil V, and the Education Level has a negative significant effect on disparity in Bakorwil V.

Keywords: *Human Development Index, Minimum Wage, Level of Education, Disparity*

RINGKASAN

Pengaruh IPM, UMK dan Tingkat Pendidikan terhadap Disparitas Regional antar Kabupaten/Kota di wilayah BAKORWIL V Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2016; Indah Azizatur Rosidah, halaman; Jurusan Ilmu Ekonomi; Fakultas Ekonomi dan Bisnis; Universitas Jember

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses perubahan yang dilakukan secara terus-menerus dalam jangka panjang yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan perkapita, meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan dan kemakmuran (Arsyad, 2010). Pembangunan daerah sebenarnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan pembangunan yang dilakukan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sadono, 1985). Pembangunan ekonomi untuk wilayah seperti kabupaten/kota lebih difokuskan pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Untuk mengukur suatu keberhasilan perekonomian dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan dapat dilihat dari besar kecilnya PDRB wilayah itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi yang seimbang di setiap wilayah atau antar wilayah yang sesuai dengan kebutuhan wilayah tersebut dapat menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi di wilayah tersebut berimbang atau berhasil. Namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tidak diimbangi dengan pemerataan akan menimbulkan masalah di setiap wilayah yaitu ketimpangan wilayah (disparitas regional) yang memperlihatkan sebuah perbedaan wilayah yaitu wilayah yang maju, berkembang, terbelakang.

Ketimpangan merupakan masalah yang sering dihadapi oleh setiap daerah. Dampak dari terjadinya ketimpangan dapat berupa dampak positif ataupun dampak negatif. Dampak positif dari ketimpangan yaitu dapat mendorong wilayah lain yang kurang maju untuk dapat bersaing dan meningkatkan pertumbuhannya sehingga akan tercapai kesejahteraan. Sedangkan dampak negatif dari ketimpangan yaitu terjadinya inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi akan sering dipandang tidak adil (Todaro, 2004).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum, dan Tingkat

Pendidikan terhadap Ketimpangan di Bakorwil V pada tahun 2010 hingga 2016. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dari tahun 2010 hingga 2016 dalam bentuk tahunan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel.

Hasil analisis regresi data panel pada Uji t terhadap hipotesis pertama (H1) dapat dilihat pada Tabel 4.8 bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap Ketimpangan di Bakorwil V selama periode tahun 2010-2016 dengan melihat taraf signifikansinya yaitu sebesar 0,016. Hubungan yang ditunjukkan oleh koefisien regresi adalah negatif, artinya semakin tinggi Indeks Pembangunan Manusia maka Ketimpangan di Bakorwil V tahun 2010-2016 akan semakin menurun (H₁ diterima). Menurut UNDP (2004) pembangunan manusia berpusat pembangunan yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan. Tujuan dari pembangunan manusia adalah untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia yang tidak mungkin tercapai tanpa adanya kebebasan memilih dan bagaimana cara mereka akan menjalani hidup. Menurut Arzu (2007) untuk meningkatkan Produk Domestik Bruto dan menurunkan tingkat ketimpangan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebaiknya menjadi prioritas dalam program pembangunan suatu negara maupun daerah. Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi akan berdampak positif terhadap distribusi pendapatan, sehingga berdampak kepada tingkat ketimpangan pembangunan yang semakin rendah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terbagi menjadi 3 dimensi yaitu angka harapan hidup, tingkat pendidikan dan angka melek huruf. Semakin baik nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) maka tingkat ketimpangan pembangunan akan semakin rendah. Begitu sebaliknya, ketika nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rendah, maka akan dapat mengakibatkan tingkat ketimpangan pembangunan semakin tinggi.

Hasil analisis regresi data panel pada Uji t terhadap hipotesis kedua (H2) menunjukkan bahwa Upah Minimum berpengaruh terhadap Ketimpangan di Bakorwil V selama periode tahun 2010-2016 dengan melihat taraf signifikansinya yaitu sebesar 0,025. Hubungan yang ditunjukkan oleh koefisien regresi adalah positif, artinya

semakin tinggi Upah Minimum maka Ketimpangan di Bakorwil V tahun 2010-2016 akan semakin meningkat (H_2 diterima). Tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah memenuhi standar hidup minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. Upah minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin. Semakin meningkat tingkat upah minimum akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraan juga meningkat dan sehingga terbebas dari ketimpangan (Kaufman 2000 dalam Okta Ryan, 2013).

Hasil analisis regresi data panel pada Uji t terhadap hipotesis ketiga (H_3) dapat dilihat pada Tabel 4.8 bahwa Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap Ketimpangan di Bakorwil V selama periode tahun 2010-2016 dengan melihat taraf signifikansinya yaitu sebesar 0,018. Hubungan yang ditunjukkan oleh koefisien regresi adalah negatif, artinya semakin tinggi Tingkat Pendidikan maka Ketimpangan di Bakorwil V tahun 2010-2016 akan semakin menurun (H_3 diterima). Todaro (1994) menyatakan bahwa selama beberapa tahun, sebagian besar penelitian dibidang ilmu ekonomi, baik di negara-negara maju maupun di negara-negara sedang berkembang, menitik beratkan pada keterkaitan antara pendidikan, produktifitas tenaga kerja, dan tingkat output. Hal ini tidak mengherankan karena, sasaran utama pembangunan di tahun 1950-an dan 1960-an adalah memaksimalkan tingkat pertumbuhan output total. Akibatnya, dampak pendidikan atas distribusi pendapatan dan usaha menghilangkan ketimpangan sebagian besar telah dilupakan. Selanjutnya Todaro (2000) menyatakan bahwa pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar. Yang mana pendidikan memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan.

PRAKATA

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh IPM, UMK dan Tingkat Pendidikan terhadap Disparitas Regional antar Kabupaten/Kota di wilayah BAKORWIL V Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2016”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik itu berupa motivasi, nasehat, saran maupun kritik yang membangun. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Agus Luthfi, M.Si. dan Bapak Fajar Wahyu Prianto, S.E., M.E selaku dosen pembimbing I dan II yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik dan pengarahan dengan penuh keikhlasan, ketulusan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) juga selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Jember. selaku Dosen Pembimbing Akademik
3. Bapak Dr. M. Miqdad, S.E., M.M.,Ak.,CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
4. Dosen dan civitas Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, terima kasih atas bimbingan dan pelayanan selama penulis menjadi mahasiswa;
5. Orang Tua tercinta dari penulis, ayahanda Alm. Ach. Djazuli Handoyo dan Rasyid Zakaria serta ibunda Maesaroh dan Mujayana, terima kasih telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan, nasehat dan kerja keras yang tidak pernah putus untuk penulis;

6. Saudara tersayang dan tercinta Ali Affan D.A, Elok Dyah F, Mirza Rahmuyono, dan Rizki Yaman beserta seluruh keluarga besarku, terimakasih atas doa dan kasih sayang, serta dukungan yang tanpa henti;
7. Keluarga kecil Rempong tercinta yaitu Kharisma Kurnia B, Eli Fatu Laili, Muhlizul Amry, Wahyudi, Rudi Hartono, Muhammad Arif Bashro, Hadiatullah, Syafqur Iqbal dan Taufik Hidayat yang selalu memberi motivasi, mendukung, menghibur, membantu bahkan meluangkan waktu untuk penulis, terima kasih banyak untuk semua kenangan baik canda tawa juga duka selama ini;
8. Sahabat-sahabat tercinta, Eko Budi Setiawan, Prihatini Dwi Oktavia dan Ivan Tamana Jonis, Juriska Rismala, terima kasih untuk semua dukungan juga menjadi tempat berkeluh kesah penulis dalam mengerjakan tugas akhir ini;
9. Teman dekat tercinta Ivan Ariesta, yang selalu sabar dalam membantu, mendukung dan meluangkan waktunya untuk penulis dalam mengerjakan tugas akhir ini;
10. Teman-teman bermain, Andika Putra, Gufron dwi, Dea, dan Lila, terima kasih sudah selalu menemani penulis ketika merasa penat dalam mengerjakan tugas akhir ini;
11. Seluruh teman-teman Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Angkatan 2014, terima kasih telah saling membantu dan kebersamaannya selama ini;
12. Teman-teman KKN 20 Desa Patokan, Probolinggo. Eugene, Andik, Lukman, Martha, Sifa, Arinda, Nunung, Ayu, dan Risqa yang selalu memberi pelajaran hidup selama 45 hari dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini;
13. Teman-teman yang juga sangat berjasa bagi penulis Wanda Arum, Kinanthi Ayu Mawarni, Bima Adi Perwira dan Solikah yang selalu ikhlas membantu penulis dalam kesulitan saat mengerjakan tugas akhir;
14. Seluruh kakak tingkat yang telah berbagi ilmu baik itu ilmu tentang perkuliahan dan bahkan diluar perkuliahan kepada penulis;

15. Seluruh teman-teman konsentrasi regional terimakasih atas pengalaman, kenangan dan perjuangan selama masa kuliah ini;
16. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Tidak ada yang sempurna di dunia ini dan Penulis menyadari bahwa terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan bagi penyempurnaan tugas akhir ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi penulisan karya tulis selanjutnya.

Jember, 28 Agustus 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING SKRIPSI	vi
HALAMAN TANDA PENGAJUAN SKRIPSI	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
RINGKASAN	xi
PRAKATA	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	13
2.1.1. Ketimpangan Wilayah.....	13
2.1.2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo-Klasik.....	17
2.1.3. Teori Ekonomi Pembangunan.....	19
2.1.4. Human Development Theory.....	22
2.1.5. Indeks Pembangunan Manusia.....	24
2.1.6. Tingkat Pendidikan	28
2.1.7. Upah Minimum.....	30
2.1.8. Hubungan IPM terhadap Ketimpangan	33
2.1.9. Hubungan Upah Minimum terhadap Ketimpangan	34
2.1.10. Hubungan Tingkat Pendidikan terhadap Ketimpangan	35
2.2 Penelitian Terdahulu	37
2.3 Kerangka Konseptual	41

2.4 Hipotesis Penelitian	43
BAB 3. METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	44
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian	44
3.3 Jenis dan Sumber Data	44
3.4 Metode Analisis Data	45
3.4.1 Analisis Regresi Data Panel	45
3.5 Uji Statistik	49
3.5.1 Uji F-Statistik	49
3.5.2 Uji t-Statistik	50
3.5.3 Uji Determinasi Berganda (<i>Uji R²</i>)	50
3.6 Uji Asumsi Klasik	51
3.6.1 Uji Multikolinearitas	51
3.5.2 Uji Heteroskedastisitas	52
3.5.3 Uji Normalitas	52
3.7 Definisi Variabel Operasional dan Pengukurannya	53
BAB 4. PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum	54
4.1.1 Indeks Pembangunan Manusia.....	54
4.1.2 Upah Minimum Kabupaten/Kota.....	56
4.1.3 Tingkat Pendidikan	57
4.1.4 Kabupaten Jember.....	58
4.1.5 Kabupaten banyuwangi.....	59
4.1.6 Kabupaten Situbondo	59
4.1.7 Kabupaten Bondowoso	60
4.1.8 Kabupaten Lumajang	61
4.1.9 Kabupaten Probolinggo.....	61
4.1.10 Kota Probolinggo	62
4.2 Analisis Deskriptif	63
4.2.1 Hasil Uji Chow.....	63
4.2.2 Hasil Uji Hausman	64
4.2.3 Hasil Regresi Data Panel.....	65
4.2.4 Uji Statistik.....	67
4.2.5 Uji Asumsi Klasik	69
4.3 Pembahasan	72
4.3.1 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan ..	72
4.3.2 Pengaruh Upah Minimum Terhadap Ketimpangan	74

4.3.3 Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Ketimpangan.....	76
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	79
5.2 Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	83

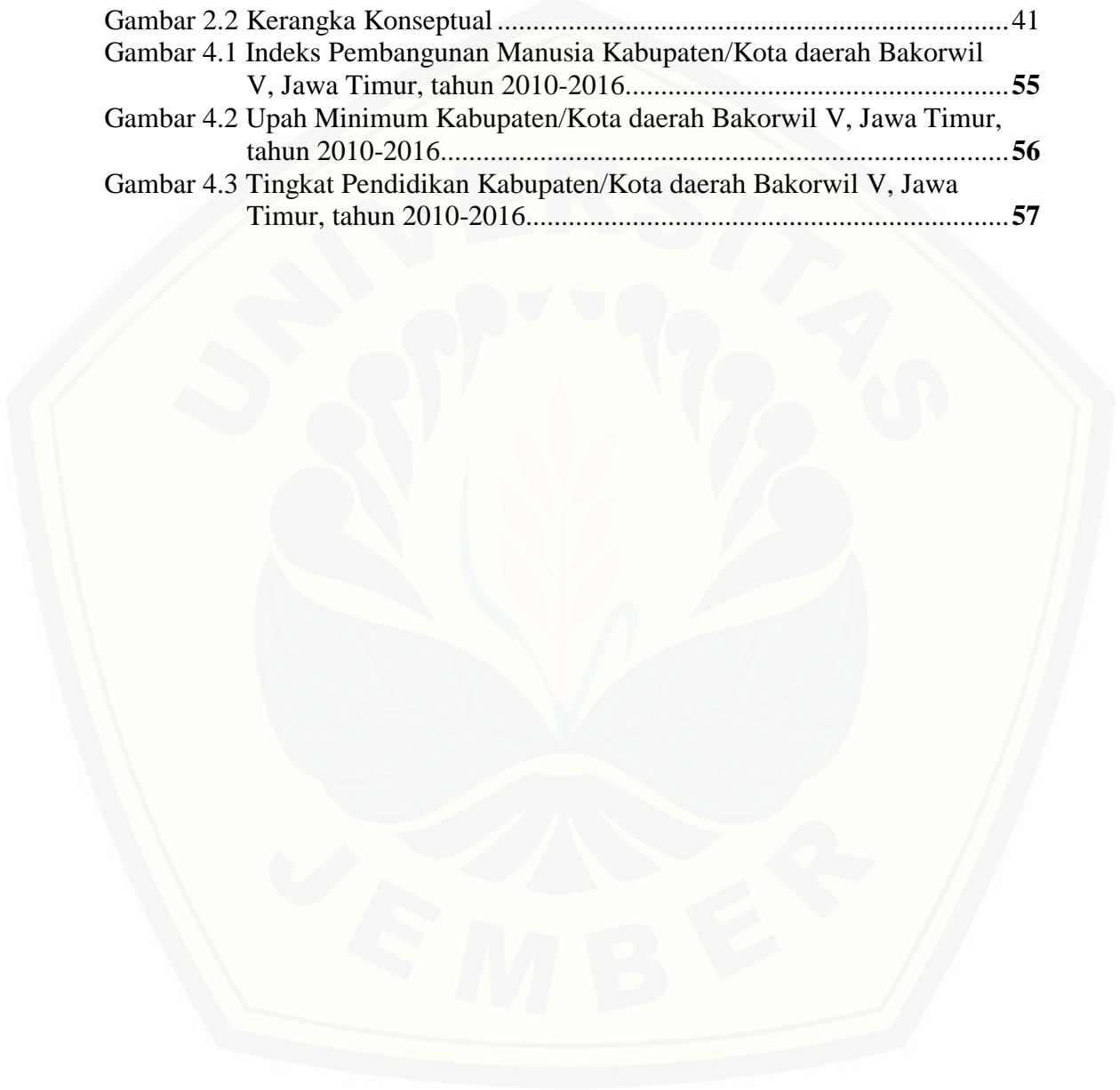
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Menurut Kabupaten/ Kota Daerah Bakorwil V, Jawa Timur, 2010-2016 (milyar rupiah).....	7
Tabel 1.2 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota daerah Bakorwil V Jawa Timur, tahun 2010-2016	8
Tabel 1.3 Upah Minimum Kabupaten/Kota daerah Bakorwil V, Jawa Timur Tahun 2010-2016 (rupiah)	10
Tabel 1.4 Tingkat Pendidikan Kabupaten/Kota daerah Bakorwil V, Jawa Timur Tahun 2010-2016 (persen)	11
Tabel 2.1 Tingkat Pembangunan Manusia.....	25
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	39
Tabel 3.1 Uji Pemilihan Model	46
Tabel 4.1 Hasil Analisis Deskriptif	63
Tabel 4.2 Hasil Chow test untuk menentukan model Common Effect atau Fixed Effect	64
Tabel 4.3 Hasil Uji Hausman Tes	65
Tabel 4.4 Hasil Analisis Regresi Data Panel dengan Pendekatan Random Effect.....	65
Tabel 4.5 Hasil Uji F	67
Tabel 4.6 Hasil Uji T.....	67
Tabel 4.7 Hasil Koefisien Determinasi	69
Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinearitas.....	70
Tabel 4.9 Hasil Uji Glejser.....	71
Tabel 4.10 Hasil Uji Jarque-Berra Test.....	71



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 PDRB Per Kapita ADHB	6
Gambar 2.1 Kurva Kuznets.....	14
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual	41
Gambar 4.1 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota daerah Bakorwil V, Jawa Timur, tahun 2010-2016.....	55
Gambar 4.2 Upah Minimum Kabupaten/Kota daerah Bakorwil V, Jawa Timur, tahun 2010-2016.....	56
Gambar 4.3 Tingkat Pendidikan Kabupaten/Kota daerah Bakorwil V, Jawa Timur, tahun 2010-2016.....	57



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses perubahan yang dilakukan secara terus-menerus dalam jangka panjang yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan perkapita, meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan dan kemakmuran (Arsyad, 2010). Pembangunan daerah sebenarnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan pembangunan yang dilakukan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sadono, 1985). Setiap daerah memiliki kemampuan membangun yang berbeda, hal tersebut dikarenakan setiap daerah memiliki potensi sumber daya yang tidak sama seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan. Dan dalam proses pembangunan terdapat beragam dalam membangun seperti pembangunan yang dilakukan di daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah baik dalam kualitas maupun kuantitas namun kurang dalam sumber daya manusia, begitu juga sebaliknya pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah yang kurang dalam hal sumber daya alam dalam hal kuantitas maupun kualitas namun memiliki sumber daya manusia yang berkualitas sehingga keadaan tersebut dapat menyebabkan perbedaan dalam pembangunan. Menurut Hirschman dalam Kuncoro (2003), perbedaan antar wilayah tersebut yang menjadi hambatan dalam pemerataan pembangunan ekonomi dikarenakan kegiatan perekonomian hanya terkonsentrasikan di wilayah yang kaya akan sumber daya alam sehingga berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi di beberapa wilayah yang memiliki sumber daya alam melimpah.

Pada umumnya pembangunan ekonomi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, begitu juga sebaliknya pertumbuhan ekonomi dapat memperlancar proses pembangunan ekonomi karena yang menjadi salah satu indikator dalam pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi untuk wilayah seperti

kabupaten/kota lebih difokuskan pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Untuk mengukur suatu keberhasilan perekonomian dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan dapat dilihat dari besar kecilnya PDRB wilayah itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi yang seimbang disetiap wilayah atau antar wilayah yang sesuai dengan kebutuhan wilayah tersebut dapat menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi di wilayah tersebut berimbang atau berhasil. Namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tidak diimbangi dengan pemerataan akan menimbulkan masalah disetiap wilayah yaitu ketimpangan wilayah (disparitas regional) yang memperlihatkan sebuah perbedaan wilayah yaitu wilayah yang maju, berkembang, terbelakang. Peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah akan disertai dengan peningkatan aktifitas ekonomi yang akan memberikan implikasi pada peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja pada masyarakat. Dan keberhasilan pembangunan di suatu wilayah dapat dilihat dari berbagai aspek yang diantaranya adalah aspek sosial budaya, pertumbuhan ekonomi dan kebijakan pemerintah dalam menangani ketimpangan dan kemiskinan. Maka dari itu peranan pemerintah sangat dominan dalam menentukan kebijakan untuk daerahnya sehingga memungkinkan untuk terjadinya ketimpangan atau mengurangi ketimpangan yang terjadi. Ketimpangan merupakan masalah yang sering dihadapi oleh setiap daerah. Dampak dari terjadinya ketimpangan dapat berupa dampak positif ataupun dampak negatif. Dampak positif dari ketimpangan yaitu dapat mendorong wilayah lain yang kurang maju untuk dapat bersaing dan meningkatkan pertumbuhannya sehingga akan tercapai kesejahteraan. Sedangkan dampak negatif dari ketimpangan yaitu terjadinya in-efisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi akan sering dipandang tidak adil (Todaro, 2004).

Provinsi Jawa Timur secara geografis terletak antara 111⁰⁰ Bujur Timur – 114⁰⁴ Bujur Timur dan 7⁰ 12' Lintang Selatan – 8⁰⁴⁸' Lintang Selatan, dengan luas wilayah sebesar 47.963 km² yang meliputi dua bagian utama yaitu Jawa Timur daratan dan Kepulauan Madura. Wilayah daratan Jawa Timur sebesar 88,70 % atau 42.541

km², sementara luas Kepulauan Madura memiliki luas 11,30 % atau sebesar 5.422 km². Secara administratif Jawa Timur terbagi menjadi 29 kabupaten dan 9 kota, dengan Kota Surabaya sebagai ibukota provinsi. Ini menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi yang memiliki jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia.

Badan koordinasi wilayah atau disingkat dengan Bakorwil, Jawa Timur terbagi menjadi 5 Bakorwil, Bakorwil I Madiun, Bakorwil II Bojonegoro, Bakorwil III Malang, Bakorwil IV Pamekasan, dan Bakorwil V Jember. Jika dibandingkan dari kelima daerah Bakorwil tersebut, Bakorwil V merupakan daerah yang memiliki rata-rata PDRB terendah sebesar Rp. 3.207.430.000 dan rata-rata PDRB tertinggi adalah Bakorwil III sebesar Rp. 18.454.892.000. Hal tersebut mengidentifikasi terjadinya ketimpangan di wilayah Bakorwil.

Bakorwil V Jember meliputi Kota Probolinggo, Kab. Probolinggo, Kab. Lumajang, Kab. Jember, Kab. Bondowoso, Kab. Situbondo dan Kab. Banyuwangi. Tujuh daerah tersebut merupakan daerah yang bekerjasama dalam hal pengembangan industri, pengembangan produk daerah dan dalam kegiatan ekonomi lainnya sehingga diharapkan hal tersebut menjadi peluang bagi ke tujuh kabupaten tersebut untuk dapat saling melengkapi dan menunjang kekurangan yang ada di setiap kabupaten sehingga akan tercapai pemerataan dan mengurangi ketimpangan.

Pembangunan khususnya bidang ekonomi ditempatkan dalam urutan pertama dari seluruh aktivitas pembangunan. Dalam rangka pembangunan ekonomi sekaligus terkait usaha-usaha pemerataan kembali hasil-hasil pembangunan yang merata keseluruh daerah, maupun berupa peningkatan pendapatan masyarakat. Secara bertahap diusahakan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, kemiskinan dan keterbelakangan (Sirojuzilam, 2008). Pembangunan ekonomi memiliki tiga sifat penting yaitu: suatu proses yang berarti terjadinya perubahan terus menerus, adanya usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita masyarakat yang terjadi dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan per kapita dan lajunya pembangunan ekonomi ditujukan dengan menggunakan tingkat

pertambahan PDB (Produk Domestik Bruto) untuk tingkat nasional dan PDRB untuk tingkat wilayah atau regional.

Ketimpangan antar daerah merupakan permasalahan yang universal, disemua negara tanpa memandang ukuran dan tingkat pembangunannya. ketimpangan merupakan masalah kesenjangan yang serius untuk ditanggulangi. Proses pembangunan dalam skala nasional yang dilaksanakan selama ini ternyata telah menimbulkan masalah pembangunan yang cukup besar dan kompleks karena pendekatan pembangunan sangat menekankan pada pertumbuhan ekonomi makro dan cenderung mengabaikan terjadinya kesenjangan-kesenjangan pembangunan ekonomi antar wilayah.

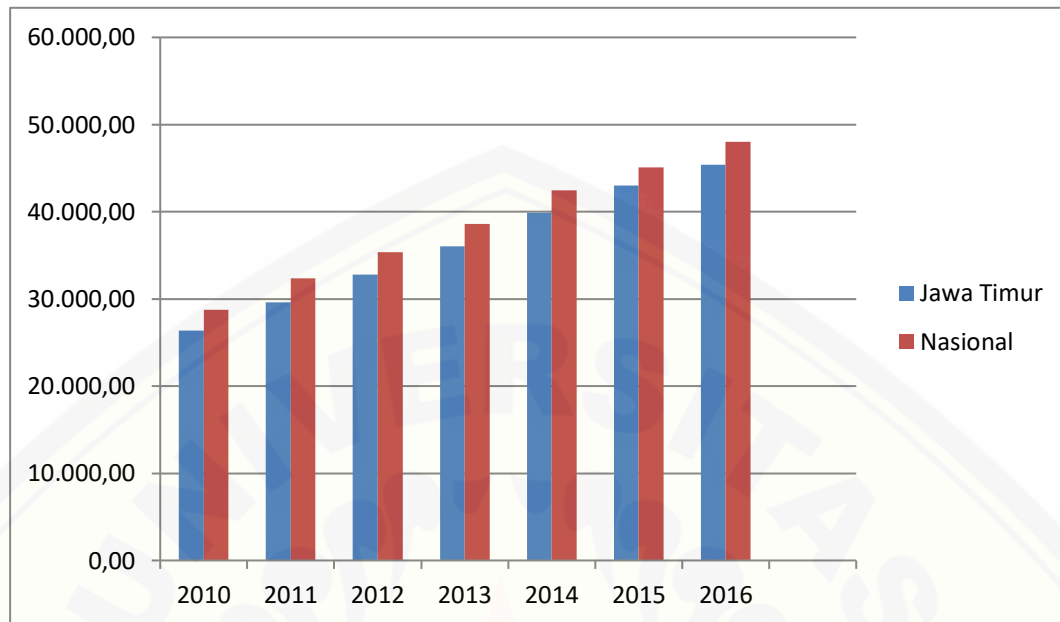
Menurut Syafrizal (2008), ketimpangan yang terjadi antar wilayah disebabkan oleh perbedaan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki, perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah, sehingga dengan adanya perbedaan ini menyebabkan kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh karena itu pada Isu dan kekhawatiran akan adanya gerakan disintegrasi tersebut akhirnya memunculkan undang-undang yang memberikan keleluasaan kepada daerah dalam wujud otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab yang sesuai kondisi dan potensi wilayahnya.

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia sudah dilakukan sejak tanggal 1 Januari 2001. Dengan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan. Diharapkan dengan adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dapat lebih pemeratakan pembangunan sesuai dengan keinginan daerah untuk mengembangkan wilayah menurut potensi masing-masing (Sasana,2012).

Pemerintah melalui Undang-undang No. 25 tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan bahwa, perencanaan pembangunan nasional maupun regional merupakan kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan

berkesinambungan mengikuti pola tertentu berdasar hasil telaah yang cermat terhadap situasi dan kondisi yang bagus. Pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk merencanakan dan mengelola pembangunan melalui Undang-undang No. 22 tahun 1999 revisi menjadi Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 revisi menjadi undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Kuncoro, 2004).

Menurut Todaro (2000), bahwa pandangan ekonomi baru menganggap tujuan utama pembangunan ekonomi bukan hanya pertumbuhan PDB semata, tapi penanggulangan ketimpangan dalam perekonomian yang terus berkembang. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa ketimpangan menjadi salah satu masalah yang harus diatasi dalam konteks pembangunan ekonomi sesuai pandangan ekonomi baru. Keberhasilan suatu perekonomian tidak lagi hanya diukur melalui peningkatan PDB, melainkan juga kemampuan suatu negara dalam mengatasi masalah ketimpangan. Permasalahan ketimpangan memang sangat kompleks untuk dibahas dan merupakan isu penting, karena dapat dikaitkan dengan beberapa indikator-indikator. Salah satu indikator ekonomi yang mempengaruhi tingkat ketimpangan ialah Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB). Apabila di suatu negara pertumbuhan ekonominya mengalami kenaikan, diharapkan akan berpengaruh pada penurunan kesenjangan sosial (Sukirno,2008)



Gambar 1.1 PDRB Per Kapita ADHB

Sumber: BPS, 2018

Pada gambar 1.1 menunjukkan bahwa setiap tahun jumlah PDRB di provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan yang artinya kinerja rata-rata Jawa Timur berkembang lebih pesat dari rata-rata provinsi lain. Dengan demikian tantangan yang dihadapi pemerintah daerah adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Tentunya untuk wilayah Bakorwil V juga berpengaruh dalam peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Menurut Todaro (2004) yang menyatakan bahwa, perekonomian yang tinggi disuatu wilayah tidak mencerminkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat wilayah tersebut. Selain itu, tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak dengan sendirinya diikuti oleh pemerataan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Timur diharapkan merata dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk membuktikan pernyataan tersebut, dapat dilihat dari perkembangan jumlah PDRB menurut Kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur yang di spesifikasikan menjadi Bakorwil V.

Tabel 1.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Menurut Kabupaten/Kota daerah Bakorwil V, Jawa Timur, 2010-2016 (milyar rupiah)

Kab/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kota Probolinggo	4 921.30	5 376.50	5 945.70	6564	7 260.70	8 072.10	8 888.10
Kab. Probolinggo	15 028.10	16 874.50	18796.80	20830.90	23 158	25 688.60	28 045.90
Kab. Lumajang	14 260.10	16 078.50	17783.30	19637	21983.10	24 417.10	26 638.10
Kab. Jember	33 375.50	37 159.50	41327.10	45055.50	50602.10	56 377.40	62 470.10
Kab. Bondowoso	8 515.90	9 552.80	10634.10	11792.60	13075.10	14 485.60	15 858.50
Kab. Situbondo	8 471.40	9 536.40	10708.20	11912.80	13338.80	14 795.70	16 278.60
Kab. Banyuwangi	32 463.80	36 950.90	42108.30	47364.70	53371.20	60 179.30	66 340.80

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Berdasarkan Tabel 1.1 perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku menurut kabupaten/kota di wilayah Bakorwil V dari tahun 2010 sampai 2016 secara umum menunjukkan kenaikan yang cukup stabil dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010, jumlah PDRB di kota Probolinggo sebesar Rp. 4.921.30 milyar, Kabupaten Probolinggo sebesar Rp. 15.028.10 milyar, Kabupaten Lumajang sebesar Rp. 14.260.10 milyar, Kabupaten Jember sebesar Rp. 33.375.50 milyar, Kabupaten Bondowoso sebesar Rp. 8.515.90 milyar, Kabupaten Situbondo sebesar Rp. 8.471.40 milyar, dan kabupaten Banyuwangi sebesar Rp. 32.463.80 milyar. Kemudian pada tahun 2016 jumlah PDRB PDRB di kota Probolinggo sebesar Rp. 8.888.10 milyar, Kabupaten Probolinggo sebesar Rp. 28.045.90 milyar, Kabupaten Lumajang sebesar Rp. 26.638.10 milyar, Kabupaten Jember sebesar Rp. 62.470.10 milyar, Kabupaten Bondowoso sebesar Rp. 15.858.50 milyar, Kabupaten Situbondo sebesar 16.278.60 milyar, dan kabupaten Banyuwangi sebesar Rp.66.340.80 milyar, yang artinya setiap kabupaten mengalami

kenaikkan pada PDRB dan setiap kabupaten memiliki jumlah PDRB yang berbeda-beda dengan demikian perbedaan tersebut dapat menimbulkan disparitas atau ketimpangan.

Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Banyuwangi sudah mulai berkembang, dan dilihat dari potensi-potensi di setiap daerah sangatlah membantu mengembangkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi ini sendiri, tetapi terdapat PDRB tiga wilayah yang tertinggal yaitu Kota Probolinggo, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di suatu daerah sangatlah penting karena akan saling mempengaruhi suatu daerah kedaerah yang lainnya, karna penentuan pusat pertumbuhan sangatlah menentukan perkembangan di wilayah Bakorwil V.

Tabel 1.2 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota daerah Bakorwil V, Jawa Timur, tahun 2010-2016. (persen)

Kab/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kota Probolinggo	67,3	68,1	68,9	70,1	70,5	71	71,67
Kab. Probolinggo	59,8	60,3	61,3	62,6	63	63,8	64,24
Kab. Lumajang	59,6	60,7	61,3	61,9	62,3	63	63,67
Kab. Jember	59,9	60,6	61,3	62,4	62,6	63	63,78
Kab. Bondowoso	59,5	60,5	62,2	63,2	63,4	64	64,21
Kab. Situbondo	60,1	60,8	62,2	63,4	63,9	64,5	64,95
Kab. Banyuwangi	64,5	65,5	66,1	66,7	67,3	68,1	68,87

Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Berdasarkan data tabel 1.2 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia di setiap daerah yang ada di Bakorwil V dari tahun 2010 hingga 2016 mengalami peningkatan. Tetapi jika dibandingkan dengan kabupaten lain, Kota Probolinggo memiliki Indeks Pembangunan Manusia tertinggi dengan IPM sebesar 71,67% pada tahun 2016. Dan Kabupaten Lumajang menjadi kabupaten yang memiliki IPM

terendah pada tahun 2016 sebesar 63,67%. Menurut data tabel 1.2 terjadi perbedaan IPM yang tinggi antara Kota Probolinggo dengan kabupaten lainnya, hal tersebut mengindikasikan adanya ketimpangan di wilayah Bakorwil V.

Ketimpangan salah satunya dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, kualitas tersebut dapat dilihat dari indeks kualitas hidup/indeks pembangunan manusia. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan. Sehingga dengan rendahnya pendapatan maka kesejahteraan tidak merata pada seluruh lapisan masyarakat.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap ketimpangan adalah upah minimum. Upah minimum merupakan upah terendah yang ditetapkan oleh undang-undang. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-01/MEN/1999. Tujuan dari penetapan upah minimum adalah untuk mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja. Beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan upah minimum tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan para pekerja tanpa mengabaikan peningkatan produktivitas, kemajuan perusahaan dan perkembangan perekonomian.

Dalam teori Neoklasik bahwa pekerja mendapatkan upah atau imbalan sesuai dengan kinerja atau usaha yang diberikan pekerja kepada pengusaha. Dengan meningkatnya upah minimum dengan demikian dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja yang artinya dengan meningkatnya kesejahteraan maka dapat mengurangi ketimpangan yang ada. Namun, jika dilihat dari sifat pasar tenaga kerja di Indonesia dengan tingkat pekerjaan rentan dan informal yang tinggi serta kapasitas yang terbatas untuk pengawasan tenaga kerja, sehingga tidak semua pekerja mendapatkan upah minimum.

Tabel 1.3 Upah Minimum Kabupaten/Kota daerah Bakorwil V, Jawa Timur, 2010-2016 (ribu rupiah)

Kab/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kota Probolinggo	741	810	885	1.103	1.250	1.437	1.780
Kab. Probolinggo	744	814	888	1.198	1.353	1.556	1.785
Kab. Lumajang	688	740	825	1.011	1.120	1.288	1.367
Kab. Jember	830	875	920	1.091	1.270	1.460	1.675
Kab. Bondowoso	668	735	800	946	1.105	1.270	1.347
Kab. Situbondo	660	737	802	1.048	1.071	1.209	1.302
Kab. Banyuwangi	824	865	915	1.086	1.240	1.426	1.576

Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Berdasarkan data tabel 1.3 tersebut menjelaskan bahwa UMK di wilayah Bakorwil V setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dengan meningkatnya UMK diharapkan dapat mengurangi tingkat ketimpangan. Kabupaten Probolinggo memiliki UMK tertinggi sebesar Rp. 1.785.000 dan memiliki selisih Rp.5000 dengan UMK Kota Probolinggo yaitu sebesar Rp.1.780.000, jika dibandingkan dengan Kabupaten Situbondo yang memiliki UMK terendah yaitu sebesar Rp. 1.302.000. Hal tersebut mengidentifikasi terjadinya ketimpangan.

Faktor selanjutnya yang berpengaruh terhadap ketimpangan adalah pendidikan. Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (human capital) dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat.

Tabel 1.4 Tingkat Pendidikan Kabupaten/Kota daerah Bakorwil V, Jawa Timur, 2010-2016 (persen)

Kab/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kota Probolinggo	84,6	86,3	88,6	88,2	83,6	86,6	87,64
Kab. Probolinggo	64,5	66,3	68,2	72,8	74,8	77,7	79,47
Kab. Lumajang	62,4	64,4	65	76,4	77,5	78,7	79,24
Kab. Jember	52,6	54,7	56,1	77,1	73,6	77,5	78,38
Kab. Bondowoso	82,3	84,6	86,8	74,3	78,7	83,1	81,71
Kab. Situbondo	85,5	87,7	89,9	78,4	78	76,7	84,61
Kab. Banyuwangi	60,1	62,3	64,4	81,9	80,7	83,8	86,93

Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Berdasarkan data Tabel 1.4 menjelaskan bahwa tingkat pendidikan disetiap kabupaten mengalami peningkatan. Namun jika dibandingkan dengan semua daerah, tahun 2016 Kota Probolinggo memiliki tingkat pendidikan tertinggi yaitu sebesar 87,64% dan Kabupaten Jember memiliki tingkat pendidikan terendah yaitu sebesar 78,38%. Kedua kabupaten tersebut memiliki selisih yang jauh sehingga hal tersebut mengindikasikan terjadinya ketimpangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana pengaruh IPM terhadap ketimpangan di Kabupaten/Kota di wilayah Bakorwil V?
- 2) Bagaimana pengaruh Upah Minimum terhadap ketimpangan di Kabupaten/Kota di wilayah Bakorwil V?
- 3) Bagaimana pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap ketimpangan di Kabupaten/Kota di wilayah Bakorwil V?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan dari penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh IPM terhadap ketimpangan di Kabupaten/Kota di wilayah Bakorwil V
- 2) Untuk mengetahui pengaruh PDRB terhadap ketimpangan di Kabupaten/Kota di wilayah Bakorwil V
- 3) Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum terhadap ketimpangan di Kabupaten/Kota di wilayah Bakorwil V

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penulisan yang telah dikemukakan maka manfaat dari penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah disparitas atau ketimpangan wilayah.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam hal disparitas atau ketimpangan wilayah.
- 3) Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang hendak mengadakan penelitian dengan permasalahan yang sejenis.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Ketimpangan Wilayah

Ketimpangan atau disparitas antar daerah merupakan hal yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Perbedaan ini membuat kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh karena itu di setiap daerah biasanya terdapat daerah maju (Developed Region) dan daerah terbelakang (Underdeveloped Region) (Sjafrizal, 2012).

Menurut Kuncoro (2006), ketimpangan mengacu pada standar hidup yang relatif pada seluruh masyarakat, karena kesenjangan antar wilayah yaitu adanya perbedaan faktor anugrah awal (endowment factor). Perbedaan ini yang membuat tingkat pembangunan di berbagai wilayah dan daerah berbeda-beda, sehingga menimbulkan gap atau jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut (Sukirno, 2010). Ketimpangan antar wilayah dimunculkan oleh Douglas C. North dalam analisisnya mengenai Teori Pertumbuhan Neo Klasik. Dalam teori tersebut dimunculkan sebuah prediksi hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hipotesa ini kemudian lebih dikenal sebagai Hipotesa Neo-Klasik (Sjafrizal, 2012).

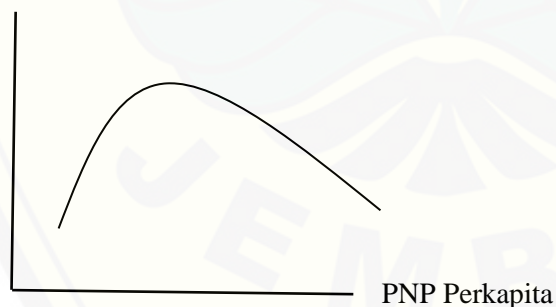
Menurut Hipotesa Neo-Klasik, pada awal proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung mengalami peningkatan. Proses ini akan terus terjadi hingga ketimpangan mencapai titik puncak. Kemudian, bila proses pembangunan berlanjut maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan mengalami penurunan. Berdasarkan hipotesa ini, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung lebih tinggi umumnya pada negara-negara sedang berkembang, dan akan terjadi sebaliknya pada negara-negara maju.

Dengan kata lain, kurva ketimpangan pembangunan antar wilayah berbentuk huruf U terbalik.

Kebenaran Hipotesa Neo-Klasik ini diuji kebenarannya oleh Williamson (1966) melalui studi mengenai ketimpangan pembangunan antar wilayah pada negara maju dan negara sedang berkembang menggunakan data time series dan cross section. Hasilnya menunjukkan bahwa Hipotesa Neo-Klasik terbukti benar secara empirik. Ini berarti bahwa proses pembangunan suatu negara tidak langsung dapat menurunkan tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah, akan tetapi pada tahap permulaan justru terjadi hal yang sebaliknya (Sjafrizal, 2012).

Simon Kuznet (1955) mengatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan akan memburuk, namun pada tahap selanjutnya, distribusi pendapatannya akan mengalami peningkatan. Observasi inilah yang kemudian, dikenal sebagai kurva Kuznet “U-Terbalik”, karena perubahan longitudinal (time-series) dalam distribusi pendapatan. Kurva Kuznet dapat dihasilkan oleh proses pertumbuhan berkesinambungan yang berasal dari perluasan sektor modern.

Koefisien Gini



Gambar 2.1 Kurva Kuznets

Sumber : Todaro, M.P, dan Smith (2006)

Hipotesis tersebut berawal dari pertumbuhan ekonomi yang awalnya meningkat pada tingkat kesenjangan pendapatan rendah sampai pada suatu tingkat pertumbuhan tertentu kemudian mengalami penurunan. Kuznet menyebutkan bahwa diantara faktor-faktor sosial, ekonomi dan politik yang mempengaruhi pola U, terdapat faktor penting

yaitu terpusatnya modal pada kelompok pendapatan tinggi dan adanya pergeseran penduduk dari sektor pertanian tradisional ke sektor industri modern. Williamson menganalisis hubungan antara distribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi pada tingkat region di suatu negara.

Terjadinya ketimpangan antar daerah juga dijelaskan oleh Myrdal (1957). Myrdal membangun teori keterbelakangan dan pembangunan ekonominya disekitar ide ketimpangan pada taraf nasional dan internasional. Untuk menjelaskannya menggunakan spread effect dan backwash effect sebagai pengaruh penjalaran dari pusat pertumbuhan ke daerah sekitar. Spread effect (dampak sebar) diartikan sebagai suatu pengaruh yang mendatangkan keuntungan (favourable effect), mencakup aliran kegiatan-kegiatan ekonomi di pusat pertumbuhan ke daerah sekitar. Backwash effect (dampak balik) diartikan sebagai pengaruh yang mendatangkan kerugian (infavourable effect), mencakup aliran manusia dari wilayah sekitar atau pinggiran termasuk aliran modal ke wilayah inti seperti individu yang berpendidikan tinggi berkumpul dengan orang yang berpendidikan tinggi pergi ke pusat kegiatan ekonomi dan mengakibatkan berkurangnya modal pembangunan bagi wilayah pinggiran yang sebenarnya diperlukan untuk dapat mengimbangi perkembangan wilayah inti.

Menurut Myrdal (1957), terjadinya ketimpangan regional karena besarnya pengaruh dari backwash effect dibandingkan dengan spread effect di negara-negara terbelakang. Perpindahan modal akan meningkatkan ketimpangan, peningkatan permintaan ke wilayah maju akan merangsang kegiatan ekonomi yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan yang akan mempengaruhi kegiatan ekonomi selanjutnya. Lingkup kegiatan ekonomi yang lebih baik pada sentra-sentra pengembangan dapat menciptakan kelangkaan modal di wilayah terbelakang (Jhingan, 2010).

b. Ukuran Ketimpangan

1. Size Distribution

Secara umum ukuran ketimpangan yang pertama ini dihitung dengan menghitung berapa persen pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk yang paling miskin. selanjutnya ukuran ketimpangan bisa pula dilakukan dengan memperbandingkan persentase pendapatan yang diterima oleh 40 persen orang paling miskin dengan persentase yang diterima oleh 20 persen orang paling kaya.

- a) Tingkat ketimpangan berat apabila 40 persen penduduk paling miskin menerima kurang dari 12 persen pendapatan nasional
- b) Tingkat ketimpangan sedang apabila 40 persen penduduk paling miskin menerima antara 12-17 persen dari pendapatan nasional
- c) Tingkat ketimpangan ringan apabila 40 persen penduduk paling miskin menerima diatas 17 persen dari pendapatan nasional

2. Kurva Lorenz

Kurva Lorenz adalah kurva yang dibuat berdasarkan angka-angka yang digunakan dalam perhitungan size distribution dengan cara menampilkannya dalam bentuk kurva. Dengan menggunakan garis horisontal sevfai persentase penduduk dan garis vertikal sebagai persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok penduduk.

3. Indeks Gini

Ukuran ketiga adalah Indeks Gini yang dihitung dengan menggunakan kurva Lorenz. Caranya dengan memperbandingkan atau membafi bidang yang dibatasi oleh garis diagonal dalam kurva Lorenz dengan garis lengkung sebagai penyimpangan atas diagonal. Angka yang didapatkan kemudian disebut indeks atau koefisien atau rasio gini. Indeks gini berkisar antara nol dan satu. Gini sebesar 0 menunjukkan pemerataan sempurna dimana semua orang mempunyai pendapatan yang persis sama. Sedangkan gini indeks 1 artinya ada ketidakmerataan yang sempurna

c. Penyebab Ketimpangan Ekonomi

Adelman dan Morris (1973) mengemukakan 8 faktor yang menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan di negara-negara sedang berkembang, yaitu:

1. Tingginya penambahan penduduk yang berdampak pada penurunan pendapatan per kapita;
2. Inflasi yaitu bertambahnya pendapatan uang tetapi tidak dengan penambahan produksi barang-barang;
3. Ketimpangan pembangunan antar daerah;
4. Banyaknya investasi dalam proyek-proyek yang padat modal (capital intensive), sehingga persentase pendapatan modal dari tambahan harta lebih besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, maka pengangguran bertambah;
5. Mobilitas social yang rendah
6. Pelaksanaan kebijaksanaan industri substitusi impor yang mengakibatkan harga-harga barang hasil industri mengalami kenaikan untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis;
7. Ketidak elastisan permintaan negara-negara terhadap barang ekspor negara-negara sedang berkembang yang menyebabkan memburuknya nilai tukar (term of trade) bagi negara-negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju, dan
8. Industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain menjadi hancur.

2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo-Klasik

Teori pertumbuhan neoklasik merupakan teori yang dikembangkan oleh Robert M Solow (1970) dan T.W Swan (1956) yang dikenal dengan Model Solow-Swan. Unsur yang digunakan pada model Solow-Swan adalah pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi, dan besarnya output yang saling berinteraksi. Yang menjadi perbedaan utama pada model Solow-Swan dengan model Harrod-Domar adalah terletak pada unsur kemajuan teknologi. Solow-swan juga menggunakan model fungsi produksi yang memungkinkan adanya substitusi antara kapital dan labour. Pada teori Solow-Swan mekanisme pasar dapat menciptakan keseimbangan sehingga tidak

memerlukan campur tangan pemerintah, jadi pemerintah hanya berperan dalam kebijakan fiskal dan kebijakan moneter saja (Tarigan 2004).

Model Solow menggunakan konsep *diminishing return* atau skala hasil yang terus berkurang dari unsur tenaga kerja dan modal apabila kedua unsur tersebut dianalisis secara terpisah. Dalam teorinya, Solow juga menggunakan asumsi *constant return to scale*. Unsur kemajuan teknologi itu sendiri menurut Solow tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain atau bersifat eksogen. Dan model neoklasik dari Solow ini juga disebut dengan model pertumbuhan eksogen (Todaro & Smith 2006).

Dalam model Solow, terdapat tiga sumber dalam meningkatkan pertumbuhan yaitu akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja, dan peningkatan teknologi. Teknologi yang dimaksud adalah peningkatan dalam skill atau teknik yang membuat produktivitas perkapita meningkat. Masalah teknologi model Solow dianggap sebagai fungsi dari waktu yang fungsi produksinya berbentuk sebagai berikut

$$Y_i = (K, L, t)$$

Yang kemudian diderivasikan rumus menjadi :

$$Y_i = a_i k_i + (1 - a_i) n_i + T$$

Y_i = Besarnya output

k_i = Tingkat pertumbuhan modal

n_i = Tingkat pertumbuhan tenaga kerja

T_i = Kemajuan teknologi

a = Bagian yang dihasilkan oleh faktor modal

$(1 - a)$ = Bagian yang dihasilkan oleh faktor diluar modal

Diperlukan mekanisme yang menyamakan investasi dengan tabungan (dalam kondisi full employment) agar faktor produksi berada pada kapasitas penuh maka

$$MPK_i = a_i \frac{Y_i}{K_i} = p$$

MPK_i = *Marginal productivity of capital*

Jika p sudah terbentuk dan a tetap konstan maka Y dan K harus tumbuh dengan tingkat yang sama.

Syarat keseimbangannya adalah :

$$\sum_{i=1} I_i = \sum_{i=1} S_i$$

Suatu daerah akan mengimpor modal jika tingkat pertumbuhan modal daerah tersebut lebih kecil daripada rasio tabungan domestik terhadap modal. Seperti pada pasar persaingan sempurna bisa dilihat dari rasio modal tenaga kerja Kapital/Labour, dimana MPL atau *marginal productivity of labour* adalah fungsi langsung tetapi bersifat terbalik dengan MPK atau *marginal productivity of capital*. Sehingga setiap daerah memiliki perbedaan seperti daerah memiliki K/L tinggi, upah riil tinggi dan MPK rendah dan ada pula daerah yang memiliki K/L rendah, upah riil rendah namun MPK tinggi. Akibatnya, modal akan mengalir dari daerah yang memiliki upah tinggi ke daerah yang memiliki upah rendah, sebaliknya tenaga kerja akan mengalir dari daerah yang memiliki upah rendah ke daerah yang memiliki upah tinggi. Mekanisnya tersebut akan menciptakan balas jasa faktor-faktor produksi di setiap daerah adalah sama (seimbang). Dengan demikian, perekonomian atau pendapatan perkapita akan mengalami proses konvergensi.

2.1.3 Teori Ekonomi Pembangunan

Pembangunan ekonomi adalah upaya meningkatkan pendapatan perkapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi real dengan melakukan penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan ketrampilan, penambahan kemampuan berorganisasi, dan manajemen (Sadono, Sukirno 1996). Pengertian lainnya Pembangunan ekonomi adalah suatu proses meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat dalam jangka panjang.

A. Teori-Teori Pembangunan

Teori pembangunan dikelompokkan dalam apa yang disebut dengan teori modernisasi dan teori struktural. Teori modernisasi adalah teori yang menjelaskan bahwa kemiskinan terutama disebabkan oleh faktor-faktor internal atau faktor yang terdapat di dalam negeri bersangkutan, sehingga diperlukan perbaikan internal. Teori modernisasi mendominasi pemikiran tentang teori pembangunan dalam literatur ekonomi arus utama. Beberapa teori dikemukakan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut.

1. Teori David Ricardo

Ricardo menyatakan bahwa output nasional (*Gross domestic product*) ditentukan oleh jumlah penduduk yang bekerja atau tenaga kerja. Apabila jumlah penduduk meningkat maka output juga akan mengalami peningkatan begitu juga sebaliknya. Menurut Ricardo, jumlah penduduk ditentukan oleh tingkat upah yang berlaku, karena tingkat upah konstan pada tingkat upah alamiah, pertumbuhan penduduk tumbuh konstan, maka bagian dari kaum kapital juga konstan pada tingkat yang minimal, akumulasi kapital berhenti. Dengan teorinya Ricardo menunjukkan bahwa pertumbuhan output atau pertumbuhan ekonomi dapat terjadi tanpa diikuti dengan perubahan dari masing-masing pelaku ekonomi.

2. Teori Arthur Lewis

Menurut Lewis perkembangan ekonomi yang pesat tidak diikuti dengan kenaikan kesejahteraan dari kaum buruh. Dapat disimpulkan dari teori Lewis bahwa ketika kaum kapitalis mengalami peningkatan dalam kesejahteraannya, kehidupan kaum buruh tetap atau tidak mengalami peningkatan juga. Pertumbuhan ekonomi tersebut akan terus berlangsung dan dapat berubah apabila terjadi kenaikan upah buruh ketika tidak ada surplus tenaga kerja, sektor modern berkembang cepat dan sektor tradisional menggunakan teknik baru atau modernisasi.

3. Teori Harrod Domar

Menurut teori H-D pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tabungan atau saving. Jika saving rendah maka pertumbuhan ekonomi akan rendah juga, begitu juga

sebaliknya. Harrod Domar pada dasarnya mengatakan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi hanya akan terjamin apabila terjadi keseimbangan pada produksi dan pengeluaran. Sehingga apabila sisi produksi dan sisi pengeluaran seimbang maka akan terjadi peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi.

4. Teori Rostow

Dalam teori Rostow terdapat 5 tahap pertumbuhan ekonomi yang diantaranya adalah :

- 1) Tahap Masyarakat Tradisional
- 2) Tahap Prasyarat Untuk Lepas Landas
- 3) Tahap Lepas Landas
- 4) Tahap Keadewasaan dan
- 5) Tahap Konsumsi Tinggi

5. Teori Joseph Schumpeter

Dalam teori Schumpeter, inovasi merupakan sumber utama dalam pembangunan. Inovasi sendiri merupakan ide-ide baru atau penemuan hal-hal yang baru yang diaplikasikan dalam masyarakat sehingga dapat meningkatkan efisiensi. Penemuan hal-hal baru tersebut dapat berupa hal baru itu bisa berupa penemuan produk baru, penemuan sumber bahan baku baru, teknik produksi baru, penemuan pasar baru maupun penemuan manajemen baru yang lebih efisien.

B. Indikator Pembangunan

Pembangunan sendiri memiliki cakupan yang luas, untuk memahami apa itu arti dari pembangunan maka terdapat beberapa indikator dalam pembangunan. Berikut beberapa indikator pembangunan :

- 1) Produk Domestik Bruto (GDP)
- 2) GDP Per Kapita
- 3) Indeks Mutu Hidup Fisik
- 4) Indeks Pembangunan Manusia
- 5) Pemenuhan Kebutuhan Pokok

2.1.4 Human Development Theory

Human development atau pembangunan manusia, Teori ini dicetuskan oleh UNDP untuk memperbaiki konsep analisis sumber daya manusia sebelumnya yang berlandaskan produk domestik bruto atau rata-rata pendapatan perkapita. Menurut UNDP (1990), pendapatan rata-rata tidak secara detil menggambarkan kondisi sumberdaya manusia di suatu wilayah. Hal ini karena kesenjangan antara penduduk kaya dan miskin cenderung tinggi, sehingga penduduk yang pada dasarnya miskin akan terdata memiliki kesejahteraan lebih tinggi. Pembangunan manusia muncul pada tahun 1990 untuk memperbaiki pengukuran tersebut. Beberapa asumsi atau konsep dasar dalam teori ini adalah :

1. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja.
2. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga dalam upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal.
3. Pembangunan manusia didukung oleh empat pilar pokok, yaitu: produktifitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan.
4. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

Sementara itu, pembangunan manusia dalam mencapai tujuan akhirnya memperhatikan empat hal utama, yaitu:

1. Produktifitas Produktifitas penduduk berkaitan dengan human capital yang dimiliki dan investasi manusia dilakukan untuk meningkatnya.

2. Pemerataan Penduduk memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial. Semua hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus.
3. Kestinambungan Pembangunan yang dilakukan tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan saat ini tapi juga masa depan.
4. Pemberdayaan Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan kehidupan mereka.

Pengukuran terhadap pembangunan manusia menggunakan konsep yang disebut dengan Human Development Index (HDI) (UNDP, 1990). Komponen pengukuran dalam HDI terdiri dari tiga, yaitu:

1. Indeks Harapan hidup Indeks Harapan Hidup menunjukkan jumlah tahun hidup yang diharapkan dapat dinikmati penduduk suatu wilayah. Dengan memasukkan informasi mengenai angka kelahiran dan kematian per tahun, variabel tersebut diharapkan akan mencerminkan rata-rata lama hidup sekaligus hidup sehat masyarakat.
2. Indeks Hidup Layak Standar hidup layak diukur menggunakan PDRB per kapita yang dianggap menggambarkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
3. Indeks Pendidikan Penghitungan Indeks Pendidikan (IP) mencakup dua indikator yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Populasi yang digunakan adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas karena pada kenyataannya penduduk usia tersebut sudah ada yang berhenti sekolah. Kedua indikator pendidikan ini dimunculkan dengan harapan dapat mencerminkan tingkat pengetahuan.

2.1.5. Indeks Pembangunan Manusia

Pengembangan sumber daya manusia disatu pihak dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan atau kemampuan kerja manusia dalam melakukan berbagai macam kegiatan dalam masyarakat. Dipihak lain pembinaan sumber daya manusia berhubungan erat dengan usaha peningkatan taraf hidup masyarakat. Pembinaan sumber daya manusia dimulai dalam kalangan keluarga, ditingkatkan melalui pendidikan dan latihan formal dan dikembangkan dalam masyarakat terutama pada lingkungan kerja. Perkembangan teknologi dalam kegiatan perekonomian sangat menuntut kepada sumber daya manusia untuk meningkatkan keterampilan.

Menurut Becker (1993) bahwa manusia bukan sekedar sumber daya namun merupakan modal (capital) yang menghasilkan pengembalian (return) dan setiap pengeluaran yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kualitas dan kuantitas modal tersebut merupakan kegiatan investasi, investasi manusia. Dan teori ini menganggap pertumbuhan penduduk ditentukan oleh produktivitas perorangan. Jika setiap orang memiliki pendapatan yang lebih tinggi karena pendidikannya lebih tinggi, maka pertumbuhan ekonomi penduduk dapat ditunjang, dengan adanya pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan.

Menurut Stockey (2003) bahwa human capital merupakan konsep yang menjelaskan manusia didalam berorganisasi dan bisnis yang merupakan aset penting yang memiliki pengaruh terhadap pengembangan dan pertumbuhan, seperti halnya mesin pada suatu perusahaan dan modal kerja. Sikap, skill, dan kemampuan manusia memiliki kontribusi terhadap produktivitas organisasi. Pengeluaran untuk pelatihan, pengembangan, kesehatan merupakan investasi pada manusia. Asumsi dasar dari teori human capital adalah bahwa seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikannya maka akan meningkatkan kemampuan kerja dan tingkat penghasilan. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia maka semakin meningkat pula efisiensi dan produktivitas.

Konsep IPM pertama kali dipublikasikan UNDP melalui *Human Development Report* pada tahun 1996, yang kemudian berlanjut setiap tahun. Dalam publikasi tersebut dijelaskan bahwa pembangunan manusia adalah sebagai “*a process of enlarging people’s choices*” atau proses yang meningkatkan aspek kehidupan masyarakat. Secara spesifik UNDP menetapkan empat elemen utama dalam pembangunan manusia yaitu produktivitas (*productivity*); Pemerataan (*equity*); keberlanjutan (*sustainability*), dan pemberdayaan (*empowerment*).

United Nations Development Programme (UNDP) dalam *Human Development Report* juga menganalisis perbandingan status pembangunan ekonomi sosial di negara maju dan negara berkembang. HDI mencoba melakukan analisis dengan memberikan peringkat atau mengelompokkan dalam tingkatan-tingkatan pada semua negara dengan skala 0 (nol) hingga 1 (satu) dimana nol merupakan skala tingkatan terendah dan satu merupakan skala tingkatan tertinggi. Berdasarkan tujuan dari pembangunan manusia terdapat tiga tujuan produk akhir pembangunan yang diantaranya adalah :

- 1) Masa hidup (*longevity*) yang diukur dengan usia harapan hidup;
- 2) Pengetahuan (*knowledge*) yang diukur dengan kemampuan baca tulis orang dewasa secara tertimbang ($\frac{2}{3}$) dan rata-rata tahun bersekolah ($\frac{1}{3}$);
- 3) Standar kehidupan (*standart of living*) yang diukur dengan pendapatan riil per kapita disesuaikan dengan paritas daya beli.

Tabel 2.1 Tingkat Pembangunan Manusia

No	Tingkat	Skala
1	Rendah	0.0 – 0.499
2	Menengah	0.50 – 0.799
3	Tinggi	0.80 – 1.0

Sumber : Todaro, 2003

Dari tabel 2.1 Tingkat Pembangunan Manusia, dapat dilihat bahwa suatu daerah dikatakan memiliki pembangunan manusia yang rendah apabila skala pembangunan

manusianya adalah 0.0-0.499 dan dikatakan menengah apabila skala pembangunannya 0.50-0.799 dan dikatakan tinggi apabila skala pembangunan manusianya 0.80-1.0.

Menurut Todaro dan Smith (2004), IPM menunjukkan bahwa kesenjangan dalam pendapatan lebih besar daripada kesenjangan dalam indikator pembangunan yang lain, paling tidak dalam indikator kesehatan dan pendidikan. IPM juga menunjukkan bahwa pembangunan yang kita maksud adalah pembangunan manusia dalam arti luas bukan hanya dalam bentuk pendapatan yang lebih tinggi. Kesehatan dan pendidikan bukan hanya fungsi produksi namun juga merupakan tujuan pembangunan yang fundamental.

Lanjouw, dkk (dalam Whisnu Adhi Saputra 2011) menyatakan pembangunan manusia di Indonesia identik dengan pengurangan ketimpangan. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin, karena bagi penduduk miskin kesehatan dan pendidikan aset utama adalah tenaga kasar mereka. Adanya fasilitas pendidikan dan kesehatan murah akan sangat membantu untuk meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan.

Kebijakan pokok dalam upaya peningkatan kualitas hidup manusia secara lintas sektoral, diantaranya adalah :

1. Peningkatan kualitas fisik manusia (*individual fisycal quality*) yang meliputi jasmani, rohani dan motivasi, serta kualitas kecukupan kebutuhan dasar seperti terpenuhinya gizi, sandang, perumahan daan pemukiman yang sehat.
2. Peningkatan kualitas keterampilan (*skills*) sumber daya manusia yang produktif dan upaya pemerataan penyebarannya.
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan lingkungan.
4. Peningkatan pranata dan penerapan hukum yang meliputi kelembagaan, perangkat, & aparat, serta kepastian hukum. Sedangkan secara sektoral, operasionalnya dilaksanakan melalui berbagai sektor pembangunan, antara lain sektor pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kependudukan,

tenaga kerja, dan sektor-sektor pembangunan lainnya

IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari 3 (tiga) indeks yang menggambarkan kemampuan dasar manusia dalam memperluas pilihan-pilihan, yaitu: 1) Indeks Kesehatan, 2) Indeks Pendidikan, 3) Indeks Pengeluaran. Setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut.

Indeks Kesehatan :

$$I_{Kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

Indeks Pendidikan :

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} - I_{RLS}}{2}$$

Indeks Pengeluaran :

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$$

Menghitung IPM

IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran.

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$$

2.1.6 Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu modal dasar manusia yang harus dipenuhi untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sektor pendidikan memainkan peran utama untuk membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitas produksi agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro, 2006).

Dalam Undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan adalah suatu usaha yang telah direncanakan untuk mewujudkan suana belajar dan proses pembelajaran agar peserya didik secara altif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Menurut Crow, pendidikan sendiri adalah proses yang berisi berbagai macam kegiatan yang sesuai dengan kegiatan seseorang untuk kehidupan sosialnya dan membantunya meneruskan kebiasaan dan kebudayaan, serta kelembagaan sosial dari generasi ke generasi.

Pendidikan sangat berperan penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang menjadi kebutuhan dasar setiap individu atau manusia dalam memenuhi upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa karena dengan pendidikan upaya peningkatan kualitas hidup manusia juga kesejahteraan masyarakat dapat di wujudkan. Pendidikan juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara, hal ini karena pendidikan berpengaruh terhadap produktivitas dan fertilitas masyarakat. Pendidikan sendiri dapat menjadikan sumber daya manusia menjadi lebih cepat belajar dan mengerti dan siap dalam menghadapi setiap perubahan-perubahan dan pembangunan suatu negara.

Menurut Marshal (Tambunan, 1997) bahwa suatu bangsa tidak mungkin memiliki tenaga kerja bertaraf internasional jika seperempat dari pelajarnya gagal dalam menyelesaikan pendidikan menengah. Di era globalisasi dan kapitalisme ini, ada sebuah penjajahan terselubung yang dilakukan negara-negara maju dari segi kapital

dan politik yang telah mengadopsi berbagai dimensi kehidupan di negara-negara berkembang. Umumnya, penjajahan ini tentu tidak terlepas dari unsur ekonomi. Dengan hutang negara yang semakin meningkat, badan atau organisasi donor pun mengintervensi secara langsung maupun tidak terhadap kebijakan ekonomi suatu bangsa. Akibatnya, terjadilah privatisasi di segala bidang. Bahkan, pendidikan pun tidak luput dari usaha privatisasi ini. Dari sini pendidikan semakin mahal yang tentu tidak bisa dijangkau oleh rakyat. Akhirnya, rakyat tidak bisa lagi mengenyam pendidikan tinggi dan itu berakibat menurunnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Sehingga, tidak heran jika tenaga kerja di Indonesia banyak yang berada di sektor informal akibat kualitas sumber daya manusia yang rendah, dan ini salah satunya karena biaya pendidikan yang memang mahal.

Ditengah iklim investasi global yang menuntut pemerintah memberikan kerangka hukum yang dapat melindungi Investor dan juga buruh murah. Buruh murah ini merupakan hasil dari adanya privatisasi (otonomi kampus), yang membuat pendidikan tidak lagi bisa dijangkau rakyat. Akhirnya, terbentuklah link up sistem pendidikan, dimana pendidikan hanya mampu menyediakan tenaga kuli dengan kemampuan minim. Kondisi masyarakat sendiri yang memang tidak bisa mengadaptasikan dirinya dengan lingkungan yang ada. Tentu hal ini tidak terlepas dari kondisi bangsa yang tengah dilanda krisis multidimensi sehingga harapan rakyat akan kehidupannya menjadi rendah. Bisa dikatakan, telah terjadi deprivasi relatif (istilah Karl Marx yang di populerkan Ted R.Gurr) dalam diri masyarakat. Hal ini akan berdampak pada kekurangannya respek terhadap dunia pendidikan, karena mereka lebih mementingkan urusan perut daripada sekolah. Akibatnya, kebodohan akan menghantui, dan kemiskinan pun akan mengiringi.

2.1.7 Upah Minimum

a. Pengertian Upah Minimum

Penetapan besarnya upah minimum yang harus dibayar perusahaan kepada tenaga kerjanya sangat penting dalam pasar tenaga kerja. Upah minimum menurut Badan Pusat Statistika merupakan upah minimum yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku pada setiap region. Upah minimum menurut Badan Pusat Statistika bertujuan untuk mengangkat derajat penduduk terlebih lagi yang berpendapatan rendah.

Kebijakan pemerintah di Indonesia mengenai upah minimum tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999 dan UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 : Upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap, tunjangan tetap merupakan suatu jumlah i mbalan yang diterima oleh tenaga kerja secara tetap dan teratur dalam pembayarannya, dimana tidak dikaitkan dengan kehadiran maupun tingkat prestasi tertentu. Tujuan dari penetapan upah minimum yaitu tercapainya penghasilan yang layak bagi pekerja.

Upah minimum pada awalnya ditentukan secara sektoral secara nasional oleh Departemen Tenaga Kerja. Namun dalam perkembangan otonomi daerah, pada tahun 2001 upah minimum ditetapkan oleh setiap provinsi. Upah minimum sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Upah minimum regional, merupakan upah bulanan yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap bagi pekerja pada tingkat paling bawah dan bermasa kerja kurang dari satu tahun yang berlaku pada suatu daerah tertentu.
2. Upah minimum sektoral, merupakan upah yang berlaku dalam suatu provinsi berdasarkan kemampuan sektor.

Tujuan utama ditetapkannya upah minimum yaitu untuk memenuhi standart hidup minimum seperti kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. Dimana dengan adanya upah minimum akan mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah. Semakin meningkatnya upah minimum akan semakin meningkatkan

pendapatan masyarakat, sehingga kesejahteraan juga meningkat, dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, maka akan mengurangi tingkat kemiskinan yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian, upah minimum memiliki hubungan yang negatif terhadap kemiskinan, semakin meningkatnya upah minimum dalam masyarakat, akan mengurangi kemiskinan yang ada (Musa Al Jundi 2014).

Menurut David Ricardo, Pertama, upah menurut kodrat adalah upah yang cukup untuk pemeliharaan hidup pekerja dengan keluarganya. Kedua, di pasar akan terdapat upah menurut harga pasar adalah upah yang terjadi di pasar dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Upah harga pasar akan berubah di sekitar upah menurut kodrat oleh ahli-ahli ekonomi modern, upah kodrat dijadikan batas minimum dari upah kerja.

Menurut Karl Marx, pada teorinya yang menjelaskan bahwa Penerapan teori klasik Karl Marx yang pada tahap-tahap awal pertumbuhan ternyata menimbulkan kesenjangan ekonomi yang semakin melebar, khususnya pada kaum kapitalis yang pendapatannya meningkat atau semakin kaya sedangkan kaum buruh yang semakin miskin. Teori klasik yang menekankan peranan kapital beserta akumulasinya dalam pertumbuhan ekonomi mendorong para pemilik modal (kapitalis) memaksimalkan penggunaan modal melalui operasi perusahaan. Kemudian dalam mencapai tujuan utama perusahaan adalah mencapai keuntungan maksimum atau laba maksimum, para kapitalis para kapitalis yang sekaligus adalah manajer perusahaan ini, antara lain berusaha menekan biaya produksi yang salah satu komponen utamanya adalah upah buruh sehingga ada pertentangan kepentingan diantara para majikan dengan buruh. Masalah penetapan upah, pihak kapitalis berada pada posisi yang lebih dominan. Maka proses pertumbuhan ekonomi klasik ini cenderung memperlebar jurang pendapatan diantara para majikan dengan buruh. Para pemilik modal menjadi semakin kaya, karena selalu berusaha memaksimalkan laba dan menginvestasikannya keuntungannya lagi, sebaliknya para buruh semakin miskin, karena selalu mendapat tekanan dari para kapitalis.

Bird dan Manning meneliti bagaimana upah minimum dapat mempengaruhi rumah tangga dalam sistem tertutup di mana mereka tidak hanya secara langsung terkena dampak di pasar tenaga kerja oleh undang-undang upah minimum, tetapi juga dipengaruhi oleh kenaikan harga barang yang diproduksi oleh perusahaan yang tunduk pada hukum upah minimum. Dengan asumsi tidak ada pengurangan lapangan pekerjaan, mereka menemukan bahwa upah minimum akan meningkatkan pendapatan rumah tangga tetapi meningkatkan ketimpangan pada kondisi yang lebih buruk karena kenaikan harga. Menurut Bird dan Manning (2005) menjelaskan konsekuensi dari struktur tenaga kerja di Indonesia, terutama sektor pertanian atau sektor informal yang tidak langsung dipengaruhi oleh kenaikan upah minimum. Tetapi terpengaruh sebagai konsumen dan menderita jika terjadi kenaikan pada harga barang. Pada 2002-2003 mereka menemukan bahwa proporsi yang lebih tinggi dari semua pekerja (dan terutama pekerja yang dipekerjakan di luar pertanian) tidak dalam posisi untuk mendapatkan keuntungan langsung dari upah minimum, dibandingkan dengan sebelum krisis.

Jenis – Jenis Upah Minimum

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2000 jangkauan wilayah upah minimum meliputi:

- a. Upah minimum provinsi (UMP) adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi.
- b. Upah minimum kabupaten/kota (UMK) adalah upah minimum yang berlaku di daerah kabupaten/kota.
- c. Upah minimum sektoral provinsi (UMPProp) adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral di seluruh kabupaten/kota dan satu provinsi
- d. Upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSKab) adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral di daerah kabupaten/kota.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah peneliti jelaskan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian regresi data panel atas Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan di Bakorwil V tahun 2010-2016 menunjukkan hubungan yang negatif signifikan. Semakin tinggi Indeks Pembangunan Manusia maka Ketimpangan akan menurun.
2. Hasil pengujian regresi data panel atas Upah Minimum (UMK) terhadap Ketimpangan di Bakorwil V tahun 2010-2016 menunjukkan hubungan yang positif signifikan. Semakin tinggi Upah Minimum maka Ketimpangan akan meningkat.
3. Hasil pengujian regresi data panel atas Tingkat Pendidikan terhadap Ketimpangan di Bakorwil V tahun 2010-2016 menunjukkan hubungan yang negatif signifikan. Semakin tinggi Tingkat Pendidikan maka Ketimpangan akan menurun.

5.3 Saran

1. Pemerintah diharapkan lebih berfokus pada peningkatan Indeks pembangunan manusia dengan cara melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan skill dan kemampuan masyarakat atau dengan melakukan investasi manusia.
2. Penetapan upah minimum disarankan untuk memperhatikan produktivitas.
3. Pemerintah diharapkan meningkatkan fasilitas publik seperti pendidikan dan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, Edisi Pertama*, BPFE, Yogyakarta
- Alvan, Arzu. Forging a Link Between Human Development and Income Inequality: Cross-Country Evidence. *Review of Social, Economic and Business Studies*, Vol.7/8, 31-43
- Azwar Saifuddin, 2001. *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- BAPPENAS and UNDP Indonesia, Indonesia Human Development Report. (2004). *The Economics Democracy: Financing Human Development in Indonesia*. Published Jointly by BPS- Statistic Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Index Pembangunan Manusia* . BPS Indonesia
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Tingkat pengangguran terbuka*. BPS Indonesia
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Upah Minimum Provinsi*. BPS Indonesia
- Badan Pusat Statistik. 2007. *Jumlah Penduduk Miskin*. BPS Indonesia
- Cholif Prasetio Wicaksono. 2010. Analisis Disparitas Pendapatan Antar Kabupaten/Kota Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2007. Universitas Diponegoro Semarang.
- Gudjarati, Damodar. 2004. *Basic Econometrics (Ekonometrika Dasar)*. Alih Bahasa Sumarno Zain. Jakarta : Erlangga
- Hudaya, D.2009. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Indonesia*. Skripsi. Bogor : Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor

- Jhingan, M. L. 2012. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Jundi, Al Musi. 2014. *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Provinsi – Provinsi di Indonesia*. Skripsi : UNDIP
- Kuncoro, Mudrajad. 2010. *Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan*, UPP STIM YKPN Yogyakarta
- Lailatul Khusnah, 2015. *Analisis Disparitas Pendapatan Antar Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2008- 2013*. STIE Perbanas Surabaya
- Masjkuri, Siti Umajah. 2007. *Perbaikan Kampung Komprehensif dan Dampak terhadap Kesejahteraan Sosial serta Kemandirian Masyarakat Miskin Kumuh di Kota Surabaya*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Mulyaningsih, Yani. 2008. *Pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor public terhadap peningkatan pembangunan manusia dan pengurangan kemiskinan*. Tesis : Universitas Indonesia.
- Nanga, Muana, 2011. *Makroekonomi: teori, masalah dan kebijakan*, Raja Grafindo Persada.
- Nasir, M. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Peraturan Republik Indonesia, No. 13. Tahun 2009 tentang. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Di perbanyak oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia*.
- Sudarwati, Ninik., 2009, *Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Mengurangi Kegagalan Penanggulangan Kemiskinan*, Malang: Inti Media.
- Sukirno Sadono. 2008. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta. P.T Raja Grafindo Persada.
- Supranto, J.1995. *Ekonometrik*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Todaro, Michael P dan Smith, Stephen C. 2006. *Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga.

Todaro, Michael P. 2003. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Alih Bahasa: Aminuddin dan Drs.Mursid. Jakarta: Ghalia Indonesia

Widarjono, Agus. 2009. *Ekonometrika Teori dan Aplikasi, untuk ekonomi dan bisnis*. Yogyakarta: Ekonisia

World Bank. 2004. *Mewujudkan Pelayanan Umum Bagi Masyarakat Miskin*.The World Bank, Jakarta.

Yudha, Okta Ryan. 2013. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2009-2011*. Skripsi : Univesitas Negeri Semarang

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran A. ANALISIS DATA

Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	6.847411	(6,39)	0.0001
Cross-section Chi-square	35.256491	6	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 06/07/18 Time: 04:43

Sample: 2010 2016

Periods included: 7

Cross-sections included: 7

Total panel (balanced) observations: 49

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.894664	0.535105	-1.671941	0.1015
X1	0.022784	0.009196	2.477695	0.0170
X2	-0.058683	0.043258	-1.356577	0.1817
X3	0.002515	0.002994	0.839958	0.4054

R-squared	0.206363	Mean dependent var	0.341511
Adjusted R-squared	0.153454	S.D. dependent var	0.189559
S.E. of regression	0.174409	Akaike info criterion	-0.576719
Sum squared resid	1.368833	Schwarz criterion	-0.422285
Log likelihood	18.12962	Hannan-Quinn criter.	-0.518127
F-statistic	3.900340	Durbin-Watson stat	0.507995
Prob(F-statistic)	0.014672		

Uji Hausman

Correlated Fixed Effects - Hausman Test

Test cross-section fixed effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section fixed	18.326913	3	0.0004

Cross-section fixed effects test comparisons:

Variable	Fixed	Fixed	Var(Diff.)	Prob.
X1	-0.044834	0.007308	0.000201	0.0002
X2	0.050137	-0.036300	0.000551	0.0002
X3	0.000653	0.000589	0.000002	0.9616

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 06/07/18 Time: 04:44

Sample: 2010 2016

Periods included: 7

Cross-sections included: 7

Total panel (balanced) observations: 49

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.805040	0.912593	3.073705	0.0038
X1	-0.044834	0.017863	-2.509936	0.0163
X2	0.050137	0.042940	1.167601	0.2501
X3	0.000653	0.003021	0.216063	0.8301

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.613510	Mean dependent var	0.341511
Adjusted R-squared	0.524320	S.D. dependent var	0.189559
S.E. of regression	0.130738	Akaike info criterion	-1.051341
Sum squared resid	0.666603	Schwarz criterion	-0.665256
Log likelihood	35.75786	Hannan-Quinn criter.	-0.904861
F-statistic	6.878693	Durbin-Watson stat	0.863286
Prob(F-statistic)	0.000007		

HASIL ESTIMASI FIXED EFFECT MODEL

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 06/07/18 Time: 04:46
 Sample: 2010 2016
 Periods included: 7
 Cross-sections included: 7
 Total panel (balanced) observations: 49

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.805040	0.912593	3.073705	0.0038
X1	-0.044834	0.017863	-2.509936	0.0163
X2	0.050137	0.042940	2.167601	0.0251
X3	-0.065321	0.003021	-2.216063	0.0181

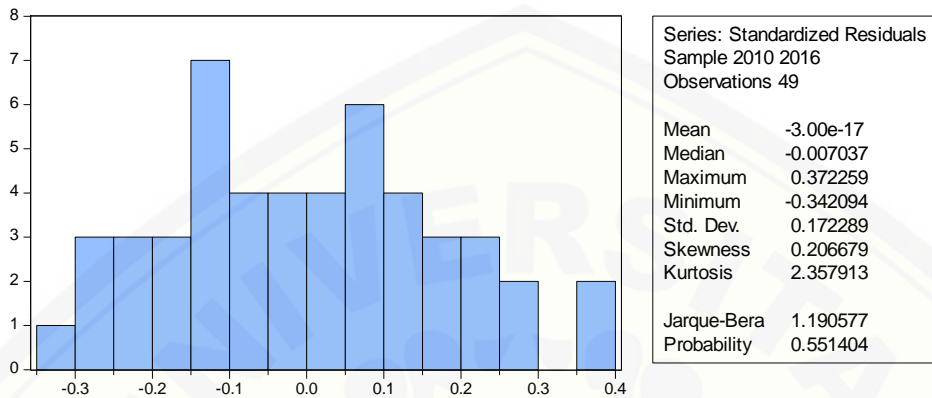
Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.613510	Mean dependent var	0.341511
Adjusted R-squared	0.524320	S.D. dependent var	0.189559
S.E. of regression	0.130738	Akaike info criterion	-1.051341
Sum squared resid	0.666603	Schwarz criterion	-0.665256
Log likelihood	35.75786	Hannan-Quinn criter.	-0.904861
F-statistic	6.878693	Durbin-Watson stat	1.863286
Prob(F-statistic)	0.000007		

LAMPIRAN Uji ASUMSI KLASIK

1. Uji NORMALITAS



2. Uji HETEROSKEDASTISITAS

Dependent Variable: REABS
 Method: Panel Least Squares
 Date: 06/07/18 Time: 04:51
 Sample: 2010 2016
 Periods included: 7
 Cross-sections included: 7
 Total panel (balanced) observations: 49

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.276592	0.267737	-1.033073	0.3071
X1	0.004787	0.004807	0.995839	0.3247
X2	3.98E-06	4.54E-06	0.877966	0.3846
X3	0.001391	0.001589	0.875647	0.3859
R-squared	0.094291	Mean dependent var		0.142761
Adjusted R-squared	0.033910	S.D. dependent var		0.094223
S.E. of regression	0.092612	Akaike info criterion		-1.842693
Sum squared resid	0.385963	Schwarz criterion		-1.688258
Log likelihood	49.14597	Hannan-Quinn criter.		-1.784101
F-statistic	1.561603	Durbin-Watson stat		1.263331
Prob(F-statistic)	0.211817			

3. UJI MULTIKOLINEARITAS

	X1	X2	X3
X1	1.000000	0.069748	0.506090
X2	0.069748	1.000000	0.110286
X3	0.506090	0.110286	1.000000



LAMPIRAN DATA TRANSFORMASI LOG

obs	Y	X1	LOG_X2	X3
1 - 10	0.436901	64.54	6.714171	60.12
1 - 11	0.386448	65.48	6.762730	62.25
1 - 12	0.410540	66.12	6.818924	64.43
1 - 13	0.316794	66.74	6.990257	81.90
1 - 14	0.249641	67.31	7.122867	80.68
1 - 15	0.183167	68.08	7.262629	83.81
1 - 16	0.122786	68.87	7.362645	86.93
2 - 10	0.550236	59.47	6.504288	82.32
2 - 11	0.487453	60.46	6.599870	84.56
2 - 12	0.518993	62.24	6.684612	86.79
2 - 13	0.399490	63.21	6.852243	74.34
2 - 14	0.314906	63.43	7.007601	78.73
2 - 15	0.230681	63.95	7.146772	83.08
2 - 16	0.154878	64.21	9.508220	81.71
3 - 10	0.474415	59.94	6.721426	52.55
3 - 11	0.395874	60.64	6.774224	54.71
3 - 12	0.373973	61.31	6.824374	56.11
3 - 13	0.286073	62.43	6.994850	77.07
3 - 14	0.227214	62.64	7.146772	73.56
3 - 15	0.107452	63.04	7.286192	77.50
3 - 16	0.239707	63.78	7.423568	78.38
4 - 10	0.215046	59.62	6.533789	62.41
4 - 11	0.127666	60.72	6.606650	64.39
4 - 12	0.058169	61.31	6.715383	65.01
4 - 13	0.042462	61.87	6.918695	76.36
4 - 14	0.155102	62.33	7.021084	77.54
4 - 15	0.266598	63.02	7.160846	78.67
4 - 16	0.368593	63.67	7.220374	79.24
5 - 10	0.412332	60.07	6.492240	85.54
5 - 11	0.353164	60.82	6.602588	87.67
5 - 12	0.395874	62.23	6.687109	89.87
5 - 13	0.373973	63.43	6.954639	78.35
5 - 14	0.286073	63.91	6.976348	77.96
5 - 15	0.227214	64.53	7.097549	76.70
5 - 16	0.107452	64.95	7.171657	84.61
6 - 10	0.239707	59.83	6.612041	64.49
6 - 11	0.119301	60.30	6.701960	66.32

6 - 12	0.131046	61.33	6.788972	68.17
6 - 13	0.137903	62.61	7.088409	72.79
6 - 14	0.285157	63.04	7.210080	74.82
6 - 15	0.437507	63.83	7.349874	77.72
6 - 16	0.574652	64.24	9.789759	79.47
7 - 10	0.799765	67.30	6.608001	84.62
7 - 11	0.530440	68.14	6.697034	86.29
7 - 12	0.836407	68.93	6.785588	88.60
7 - 13	0.719631	70.05	7.005789	88.24
7 - 14	0.655272	70.49	7.130899	83.61
7 - 15	0.619188	71.01	7.270313	86.62
7 - 16	0.390704	71.67	7.484369	87.64

CROSSID

	CROSSID	Effect
1	Kab. Banyuwangi	0.088113
2	Kab. Bondowoso	-0.040384
3	Kab. Jember	-0.122075
4	Kab. Lumajang	-0.250478
5	Kab. Situbondo	-0.077097
6	Kab. Probolinggo	-0.158876
7	Kota Probolinggo	0.560797

STATISTIK DESKRIPTIF

Variabel	IPM	Upah	Pendidikan	Ketimpangan
Min	59,47	660	52,55	0,107451774
Max	71,67	17850	89,87	2,013294057
Mean	63,94	1659,67	76,53	0,50

F TABEL

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05															
df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	4.05	3.20	2.81	2.57	2.42	2.30	2.22	2.15	2.09	2.04	2.00	1.97	1.94	1.91	1.89
47	4.05	3.20	2.80	2.57	2.41	2.30	2.21	2.14	2.09	2.04	2.00	1.96	1.93	1.91	1.88
48	4.04	3.19	2.80	2.57	2.41	2.29	2.21	2.14	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
49	4.04	3.19	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
50	4.03	3.18	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.07	2.03	1.99	1.95	1.92	1.89	1.87
51	4.03	3.18	2.79	2.55	2.40	2.28	2.20	2.13	2.07	2.02	1.98	1.95	1.92	1.89	1.87
52	4.03	3.18	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.07	2.02	1.98	1.94	1.91	1.89	1.86
53	4.02	3.17	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
54	4.02	3.17	2.78	2.54	2.39	2.27	2.18	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
55	4.02	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.06	2.01	1.97	1.93	1.90	1.88	1.85
56	4.01	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
57	4.01	3.16	2.77	2.53	2.38	2.26	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
58	4.01	3.16	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.05	2.00	1.96	1.92	1.89	1.87	1.84
59	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.04	2.00	1.96	1.92	1.89	1.86	1.84
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.95	1.92	1.89	1.86	1.84
61	4.00	3.15	2.76	2.52	2.37	2.25	2.16	2.09	2.04	1.99	1.95	1.91	1.88	1.86	1.83
62	4.00	3.15	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.99	1.95	1.91	1.88	1.85	1.83
63	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
64	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.24	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
65	3.99	3.14	2.75	2.51	2.36	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.85	1.82
66	3.99	3.14	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.84	1.82
67	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.98	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82
68	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82
69	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.86	1.84	1.81
70	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.14	2.07	2.02	1.97	1.93	1.89	1.86	1.84	1.81

T TABEL

Df	Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
		0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
41		0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42		0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43		0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44		0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45		0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46		0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47		0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48		0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49		0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50		0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51		0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52		0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53		0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54		0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55		0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
56		0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57		0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58		0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59		0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
60		0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171
61		0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930
62		0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696
63		0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471
64		0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253
65		0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041
66		0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239	3.21837
67		0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639
68		0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446
69		0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64898	3.21260
70		0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790	3.21079
71		0.67796	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686	3.20903
72		0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64585	3.20733
73		0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487	3.20567
74		0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391	3.20406
75		0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64298	3.20249
76		0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.64208	3.20096
77		0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.64120	3.19948
78		0.67765	1.29250	1.66462	1.99085	2.37511	2.64034	3.19804
79		0.67761	1.29236	1.66437	1.99045	2.37448	2.63950	3.19663
80		0.67757	1.29222	1.66412	1.99006	2.37387	2.63869	3.19526

LAMPIRAN REKAPITULASI DATA PENELITIAN. IPM, UMK, DAN TINGKAT PENDIDIKAN, DISPARITAS, PDRB BAKORWIL V TAHUN 2010-2016

No	Tahun	NAMA KAB/KOTA	IPM (X1)	UPAH MINIMUM (X2)	PENDIDIKAN (X3)	DISPARITAS	PDRB	PDRB Rata-rata	fi	n	Yi-Y	Pangkat (Yi-Y)	fi/n	SQRT
1	2010	Kab Banyuwangi	64,54	824	60,12	0,436901125	8515,9	18795,03	9,93	15,56	-10279,13	105660513,6	0,63817481	8211,57
2	2011	Kab Banyuwangi	65,48	865	62,25	0,386447628	9552,8	18795,03	9,61	15,56	-9242,23	85418815,37	0,61760925	7263,295
3	2012	Kab Banyuwangi	66,12	915	64,43	0,410539925	10634,1	18795,03	13,91	15,56	-8160,93	66600778,46	0,89395887	7716,11
4	2013	Kab Banyuwangi	66,74	1086	81,9	0,316794197	11792,6	18795,03	11,25	15,56	-7002,43	49034025,9	0,72300771	5954,156
5	2014	Kab Banyuwangi	67,31	1240	80,68	0,249641185	13075,1	18795,03	10,47	15,56	-5719,93	32717599,2	0,67287918	4692,014
6	2015	Kab Banyuwangi	68,08	1426	83,81	0,183166748	14485,6	18795,03	9,93	15,56	-4309,43	18571186,92	0,63817481	3442,625
7	2016	Kab Banyuwangi	68,87	1576	86,93	0,122785849	15858,5	18795,03	9,61	15,56	-2936,53	8623208,441	0,61760925	2307,764
8	2010	Kab Bondowoso	59,47	668	82,32	0,550235768	8515,9	18795,03	15,75	15,56	-10279,13	105660513,6	1,0122108	10341,7
9	2011	Kab Bondowoso	60,46	735	84,56	0,487452941	9552,8	18795,03	15,29	15,56	-9242,23	85418815,37	0,98264781	9161,693
10	2012	Kab Bondowoso	62,24	800	86,79	0,518993077	10634,1	18795,03	22,23	15,56	-8160,93	66600778,46	1,42866324	9754,49
11	2013	Kab Bondowoso	63,21	946	74,34	0,399490197	11792,6	18795,03	17,89	15,56	-7002,43	49034025,9	1,14974293	7508,43
12	2014	Kab Bondowoso	63,43	1105	78,73	0,314905607	13075,1	18795,03	16,66	15,56	-5719,93	32717599,2	1,07069409	5918,66
13	2015	Kab Bondowoso	63,95	1270	83,08	0,230681247	14485,6	18795,03	15,75	15,56	-4309,43	18571186,92	1,0122108	4335,661
14	2016	Kab Bondowoso	64,21	13470	81,71	0,154878226	15858,5	18795,03	15,29	15,56	-2936,53	8623208,441	0,98264781	2910,941
15	2010	Kab Jember	59,94	830	52,55	0,674415223	33375,5	18795,03	11,76	15,56	14580,47	212590105,4	0,75578406	12675,65
16	2011	Kab Jember	60,64	875	54,71	0,846548805	37159,5	18795,03	11,68	15,56	18364,47	337253758,4	0,75064267	15910,91
17	2012	Kab Jember	61,31	920	56,11	1,280059273	41327,1	18795,03	17,74	15,56	22532,07	507694178,5	1,14010283	24058,75
18	2013	Kab Jember	62,43	1091	77,07	1,290298334	45055,5	18795,03	13,27	15,56	26260,47	689612284,6	0,85282776	24251,2
19	2014	Kab Jember	62,64	1270	73,56	1,513164122	50602,1	18795,03	12,44	15,56	31807,07	1011689702	0,79948586	28439,97
20	2015	Kab Jember	63,04	1460	77,5	1,738361141	56377,4	18795,03	11,76	15,56	37582,37	1412434535	0,75578406	32672,55
21	2016	Kab Jember	63,78	1675	78,38	2,013294057	62470,1	18795,03	11,68	15,56	43675,07	1907511740	0,75064267	37839,92
22	2010	Kab Lumajang	59,62	688	62,41	0,215046314	14260,1	18795,03	12,36	15,56	-4534,93	20565590,1	0,79434447	4041,802

23	2011	Kab Lumajang	60,72	740	64,39	0,127666229	16078,5	18795,03	12,14	15,56	-2716,53	7379535,241	0,78020566	2399,491
24	2012	Kab Lumajang	61,31	825	65,01	0,581693521	17783,3	18795,03	18,17	15,56	-1011,73	1023597,593	1,16773779	1093,295
25	2013	Kab Lumajang	61,87	1011	76,36	0,424621891	19637	18795,03	13,98	15,56	841,97	708913,4809	0,89845758	798,0781
26	2014	Kab Lumajang	62,33	1120	77,54	0,155102457	21983,1	18795,03	13,01	15,56	3188,07	10163790,32	0,83611825	2915,155
27	2015	Kab Lumajang	63,02	1288	78,67	0,266598477	24417,1	18795,03	12,36	15,56	5622,07	31607671,08	0,79434447	5010,726
28	2016	Kab Lumajang	63,67	1367	79,24	0,368593451	26638,1	18795,03	12,14	15,56	7843,07	61513747,02	0,78020566	6927,725
29	2010	Kab Situbondo	60,07	660	85,54	0,41233159	10708,2	18795,03	14,29	15,56	-8086,83	65396819,45	0,91838046	7749,785
30	2011	Kab Situbondo	60,82	737	87,67	0,353163682	11708,11	18795,03	13,65	15,56	-7086,92	50224435,09	0,87724936	6637,722
31	2012	Kab Situbondo	62,23	802	89,87	0,395874078	11881,06	18795,03	18,02	15,56	-6913,97	47802981,16	1,15809769	7440,465
32	2013	Kab Situbondo	63,43	1048	78,35	0,373973322	11912,8	18795,03	16,23	15,56	-6882,23	47365089,77	1,04305913	7028,84
33	2014	Kab Situbondo	63,91	1071	77,96	0,286073139	13338,8	18795,03	15,11	15,56	-5456,23	29770445,81	0,97107969	5376,753
34	2015	Kab Situbondo	64,53	1209	76,7	0,227214421	14338,8	18795,03	14,29	15,56	-4456,23	19857985,81	0,91838046	4270,502
35	2016	Kab Situbondo	64,95	1302	84,61	0,107451774	16638,8	18795,03	13,65	15,56	-2156,23	4649327,813	0,87724936	2019,559
36	2010	Kab Probolinggo	59,83	744	64,49	0,239706563	15018,1	18795,03	22,14	15,56	-3776,93	14265200,22	1,42287918	4505,292
37	2011	Kab Probolinggo	60,3	814	66,32	0,11930087	16874,5	18795,03	21,21	15,56	-1920,53	3688435,481	1,36311054	2242,263
38	2012	Kab Probolinggo	61,33	888	68,17	0,131046333	18796,8	18795,03	30,13	15,56	1,77	3,1329	1,93637532	2,463021
39	2013	Kab Probolinggo	62,61	1198	72,79	0,137903333	20830,9	18795,03	25,22	15,56	2035,87	4144766,657	1,62082262	2591,897
40	2014	Kab Probolinggo	63,04	1353	74,82	0,285156617	23158	18795,03	23,48	15,56	4362,97	19035507,22	1,50899743	5359,527
41	2015	Kab Probolinggo	63,83	1556	77,72	0,437507174	25688,6	18795,03	22,14	15,56	6893,57	47521307,34	1,42287918	8222,96
42	2016	Kab Probolinggo	64,24	17850	79,47	0,574652225	28045,9	18795,03	21,21	15,56	9250,87	85578595,76	1,36311054	10800,61
43	2010	Kab Probolinggo	67,3	741	84,62	0,799764599	4945,7	18795,03	18,33	15,56	-13849,33	191803941,4	1,17802057	15031,6
44	2011	Kota Probolinggo	68,14	810	86,29	0,530439537	5345,7	18795,03	8,55	15,56	-13449,33	180884477,4	0,54948586	9969,627
45	2012	Kota Probolinggo	68,93	885	88,6	0,836406516	5945,7	18795,03	23,29	15,56	-12849,33	165105281,4	1,49678663	15720,29
46	2013	Kota Probolinggo	70,05	1103	88,24	0,719630812	6564,7	18795,03	19,03	15,56	-12230,33	149580971,9	1,22300771	13525,48
47	2014	Kota Probolinggo	70,49	1250	83,61	0,655271623	7260,7	18795,03	17,74	15,56	-11534,33	133040768,5	1,14010283	12315,85
48	2015	Kota Probolinggo	71,01	1437	86,62	0,619188073	8072,7	18795,03	18,33	15,56	-10722,33	114968360,6	1,17802057	11637,66

49	2016	Kota Probolinggo	71,67	1780	87,64	0,390704154	8888,7	18795,03	8,55	15,56	-9906,33	98135374,07	0,54948586	7343,296
----	------	------------------	-------	------	-------	-------------	--------	----------	------	-------	----------	-------------	------------	----------

